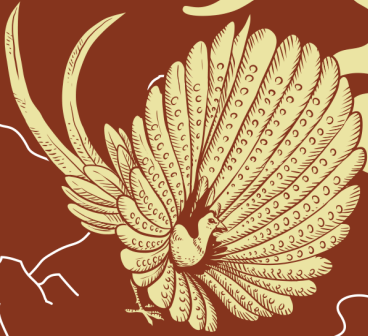


# PEREMPUAN DAN ANAK

Pemberdayaan dan Perlindungan  
Masa Depan yang Inklusif



Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020



# PEREMPUAN DAN ANAK

Pemberdayaan dan Perlindungan  
Masa Depan yang Inklusif

**Webinar Seri 6**  
**Kongres Kebudayaan Desa 2020**  
**1-10 Juli 2020**



## **PEREMPUAN DAN ANAK**

Pemberdayaan dan Perlindungan Masa Depan yang Inklusif

©Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggunharjo, Yogyakarta

Web: [www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Yona Primadesi
Penyelia aksara	: Suhairi Ahmad
Desain & ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan Agus Teriyana
Tata letak isi	: Prima Hidayah

Cetakan pertama, Agustus 2020

Ukuran Buku:

13 x 19 cm, xxxiv + 130 hlm.

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



## Pengantar Editor

*Yona Primadesi*

**K**eterlibatan dan peran perempuan di masyarakat bukan jalan yang mulus dan mudah. Hal tersebut, terutama dilatarbelakangi oleh kultur patriarki yang telah menjadi ideologi dalam kehidupan sosial dan budaya. Ideologi kultur patriarki tersebut mengelompokkan peran dan arena antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya memunculkan ketidakadilan dalam banyak aspek. Kesenjangan yang diterima perempuan melahirkan

sebuah *standpoint*, yang memosisikan perempuan lebih rendah dan terpinggirkan dari kelompok dominan, yaitu kaum patriarki yang berorientasi kepentingan. Perbedaan kelas sosial antara perempuan dan laki-laki ini kemudian melahirkan segala bentuk kecenderungan diskriminasi yang diterima oleh perempuan.

Di Indonesia, ideologi patriarki yang mengakar kuat hanya menyisakan sedikit ruang bagi perempuan dalam arena produksi, hingga publik. Perempuan menjadi termarginalkan dan perannya kemudian hanya melingkupi persoalan domestik. Sektor domestik dinilai sebagai sektor yang statis dan konsumtif, sementara sektor publik bersifat dinamis dan memiliki sumber kekuasaan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, yang pada akhirnya mampu menghasilkan dan mengendalikan perubahan sosial. Laki-laki kemudian memiliki kewenangan tidak hanya untuk nafkah, melainkan juga kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga.

Hal tersebut dinilai sangat perlu didekonstruksi, terutama ketika dihadapkan pada realitas di masa pandemi yang telah mengubah tatanan kehidupan seluruh dunia: aspek sosial, ekonomi, politik hingga unit terkecil di dalam keluarga. Setiap orang mengalami kegagalan menghadapi pandemi. Di tengah kondisi demikian, persoalan terkait perempuan dan anak juga mengalami tantangan serupa.

Selain guncangan ekonomi bagi perempuan yang bergerak di bidang domestik, beban ganda juga turut dirasakan oleh perempuan yang bekerja, yang mampu memicu tekanan psikologi. Hal tersebut



semakin diperburuk oleh sikap pasangan yang tidak kooperatif dalam pembagian peran di keluarga dikarenakan kultur patriarki tersebut. Untuk itu, kita perlu menata ulang dasar pemahaman aktivitas basis gender. Tidak hanya melihat laki-laki, tetapi juga perempuan sebagai agen perubahan, turut merefleksikan kembali peran perempuan, apa yang dikerjakan perempuan, sekaligus daya yang dimiliki perempuan, terutama dalam menghadapi Covid-19.

Seri 6 webinar dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa 2020 terselenggara pada hari Jumat, 3 Juli 2020, khusus membahas tentang **Perempuan & Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa & Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif**. Dalam seri ini hadir lima pembicara yang memaparkan gagasannya terkait Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu (1) Dr. Risa Permanadeli dari Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia, (2) Ema Husein dari SPAK Sulawesi Selatan, (3) Hasan Aoni dari Omah Dongeng Marwah Kudus, (4) Myra Diarsi dari Lembaga Gerak Pemberdayaan Jawa Tengah, dan (5) Wakhit Hasyim dari Yayasan Wangsakerta Cirebon, dengan moderator Tata Gandi, yang sehari-hari berkarya di Rekso Dyah Utami UGM sebagai Koordinator Bidang Reintegrasi Sosial dan Pemulangan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Webinar seri 6 ini juga mencoba menemukan alternatif jawaban mengenai:

1. rumusan menjadi perempuan yang mampu menguatkan tatanan Indonesia Baru dari desa;



2. strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah pandemi Covid-19;
3. bentuk dan mekanisme pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan pada masa *new normal*;
4. sistem yang bisa dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi perempuan di tengah pandemi Covid-19 dan pada masa *new normal*;
5. mekanisme kebijakan penanganan kesehatan mental bagi perempuan dan anak di tengah masa pandemi Covid-19;
6. pemodelan alternatif untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan mental dalam masa *new normal* bagi perempuan dan anak;
7. strategi dan mekanisme pertahanan keluarga yang bisa dilakukan perempuan dalam rangka penanganan krisis finansial dalam keluarga akibat Covid-19.

Seri webinar kali ini berupaya mendorong narasumber untuk sumbang gagasan dan pengalaman, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Akan tetapi dikarenakan berbagai hambatan, sebagian dari narasumber hanya bisa memaparkan ide dan pengalaman mereka dalam bentuk lisan, yang kemudian dijalin menjadi sebuah kesatuan tulisan yang utuh oleh tim Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Buku ini merupakan keluaran dari kegiatan webinar seri ke-6 Kongres Kebudayaan Desa 2020, baik yang ditulis langsung oleh narasumber, tulisan yang merupakan catatan dari tim kongres,



maupun beberapa tulisan yang lolos kurasi *Call for Paper*. Semoga tulisan dari webinar seri 6 yang telah berbentuk buku dan berada di tangan pembaca ini mampu menyumbang ide, gagasan, untuk arah Indonesia baru selama dan setelah berakhir Covid-19, yang berpijak dari nilai luhur masyarakat desa. Akhir kata, selamat membaca![]

Kampoeng Mataraman, Juli 2020





## Sekapur Sirih

*Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera  
bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati.



Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres



Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual*



*trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam.*[]

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





## Sekapur Sirih

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

### **Melawan korupsi dari desa.**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat

banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada



prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik



dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak

ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





## Sekapur Sirih

*Menteri Desa, PDTT*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif



yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua



Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





## Pidato Kebudayaan

*Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud*

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan cara hidup,

cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing*, *lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti

ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan



berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak,



nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang



dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam. []

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editor .....</b>	<b>V</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	
<b>1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>x</b>
Hamengku Buwono X	
<b>2. Dirwktur Dikyanmas KPK .....</b>	<b>xv</b>
Giri Suprpdiono	
<b>3. Menteri Desa, PDTT .....</b>	<b>xxi</b>
Abdul Halim Iskandar	

**Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan,  
Kemendikbud ..... xxiv**  
Dr. Hilmar Farid

**Mencari Kesenambungan Pemikiran  
Tentang Desa dan Perempuan ..... 1**  
Risa Permanadeli

**Gerakan Pemberdayaan Perempuan  
di Provinsi Jawa Tengah ..... 14**  
Myra Diarsi

**Revitalisasi Fungsi Desa dengan Pelibatan Perempuan ..... 24**  
Wakhit Hasim

**Mewujudkan Desa yang Berintegritas dan  
Inklusif Melalui Penguatan Perempuan dan Anak ..... 34**  
Ema Husein

**Kreativitas sebagai Basis Kemandirian ..... 48**  
Hasan Aoni Aziz

**Membangun Sistem Pengawasan dan  
Penanganan Terpadu Kekerasan Seksual  
yang Menjangkau Perdesaan ..... 62**  
Diah Irawaty



<b>Efektivitas Program Psikoedukasi Prevensi Intensi Pernikahan Dini di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan .....</b>	<b>82</b>
Muniri, S.HI, M.HI	
<b>Epilog .....</b>	<b>90</b>
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa	
<b>Deklarasi Arah Tatatan Indonesia Baru dari Desa .....</b>	<b>125</b>
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 .....</b>	<b>128</b>





# Mencari Kesenambungan Pemikiran Tentang Desa dan Perempuan<sup>1</sup>

*Risa Permanadeli<sup>2</sup>*

Perjalanan peradaban modern selama 6 abad, yang membuat gerak linear dari alam ke bangku sekolah, dari tubuh ke pikiran, dari pertanian ke industri, dari tradisi ke modernitas, dan dari

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 6: Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2. Dr. Risa Permanadeli, Ph.D merupakan doktor Psikologi Sosial dari Ecole des Hautes en Sciences Socialis, Paris. Gelar doktornya diraih dengan riset yang fokus pada perkembangan pemikiran sosial dalam masyarakat non-Barat, khususnya di Indonesia. Hasil disertasi tersebut kemudian menjadi buku, *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*, Tahun 2005, ia mendirikan Pusat Kajian Representasi Sosial. Ia juga aktif mengajar psikologi sosial di Universitas Indonesia.

desa ke kota, akhirnya mengalami jalan buntu. Kebuntuan terjadi justru ketika modernitas telah mencapai puncaknya.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, perjalanan 6 abad yang selalu menyisakan mitologi tentang kebenaran pikiran yang dibayangkan menjadi puncak peradaban juga berhadapan dengan kesadaran bahwa kedigdayaan pikiran memiliki kegamangan. Semua persoalan tersebut seakan terbentur di hadapan Covid-19. Pandemi Covid-19 kemudian menjadi titik letup yang tidak hanya menyadarkan kita bahwa pikiran menemukan batas kebenarannya sendiri, tetapi juga kesadaran untuk mengkaji ulang arah dan tujuan jalur kemajuan peradaban manusia yang dijalani dan diangankan selama ini.

Bagi masyarakat pascaindustrial barat, kerinduan untuk menemukan kembali hal-hal yang telah ditinggalkan enam abad yang silam menjadi beralasan. Hal tersebut disebabkan karena alam tetap menjadi sumber utama seluruh daya hidup makhluk semesta, pertanian tetap menjadi wahana untuk belajar tentang hubungan paling mendasar antara manusia dan semesta, tubuh yang selama ini terpinggirkan oleh mitologi dosa dan mitologi kebenaran pikiran, ternyata bagian paling hakiki yang menentukan seluruh rumusan untuk menjadi manusia, dan tradisi yang dianggap sebagai penghalang untuk memenangkan pertarungan menegakkan pikiran, nyatanya rumah makna yang aman untuk menjaga kesinambungan waktu dan ruang serta bagaimana mereka bergerak bersama napas kehidupan setiap manusia yang hidup di dalamnya. Di saat makhluk

---

3. Dalam dunia ilmu pengetahuan sosial, keadaan ini disebut sebagai tahap pascaindustrial.

modern tersebut secara kritis mempertanyakan kembali tentang modernitas, tanpa bisa ditolak mereka sesungguhnya menggugat kebenaran yang memuja mitologi kota sebagai pusat peradaban. Gugatan ini yang kemudian memaksa kita untuk menengok ulang keberadaan desa (baca: alam).

Gerakan untuk menanggalkan mitologi kota bagi masyarakat modern sebenarnya sudah bergema sejak akhir tahun 1960an, ketika pikiran yang mereka letakkan sebagai penggerak peradaban memperlihatkan petaka baru, yaitu ideologi.<sup>4</sup> Naluri untuk berkuasa, juga perang, mengoyak seluruh otoritas pikiran dengan mempertanyakan apa saja yang telah ditinggalkan, serta nilai yang harus dibayar sebagai gantinya sekian abad lamanya. Kegelisahan modern tersebut terjawab ketika menemukan ulang desa (alam) lengkap dengan seluruh kemanusiaan yang melekat di dalamnya.

---

4. Kesadaran bermula dari gerakan demonstrasi mahasiswa di Paris tahun 1968, yang dianggap sebagai Revolusi Kebudayaan karena mereka memutar ulang seluruh ingatan tentang kemajuan dan kenyamanan dengan mempertanyakan kembali otoritas pikiran di hadapan sejumlah pertanyaan tentang kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan oleh pikiran itu sendiri. Teori-teori ilmu sosial yang berkembang pascaperiode ini kemudian menjadi acuan dari seluruh disiplin dalam ilmu sosial hari ini dengan selalu berpihak pada kelompok yang terabaikan. Perempuan dan alam semesta adalah dua tema besar yang menjadi dasar perubahan yang akan terus menantang pikiran modern. Untuk pemikiran filsafat, lihat Edgar Morin (2015), *Penser Global: l'humain et son univers*, Paris, Robert Laffont; untuk pemikiran sosiologi, lihat Alain Touraine (1995), *Critique of Modernity*, Oxford: Blackwell; untuk pemikiran ekologis dan filsafat, lihat Serge Moscovici (1968/1977), *Essai sur l'histoire humaine de la nature*, Paris: Flammarion; (1972), *La Société contre la nature*, Paris: UGE-Seuil; untuk pemikiran tentang perempuan, lihat Simone de Beauvoir (1949), *Le deuxième sexe*, Paris: Editions Galimard.



Awal gerakan kembali ke desa dan menemukan ulang martabat kemanusiaan juga menjadi titik tolak ditemukannya unsur nonpikiran (tubuh), yang kemudian menandai lahirnya kesadaran baru tentang keberadaan makhluk perempuan dalam peradaban manusia modern. Tubuh dan keperempuanan tidak lagi semata materi dari objek pikiran. Tubuh dan keperempuanan memiliki watak dan nalar sendiri yang tidak tunduk pada prinsip otoritas dan kebenaran pikiran yang nirbatas. Watak tubuh dan keperempuanan justru sepenuhnya menerima hukum keterbatasan, menerima watak perbedaannya dengan pikiran, yang menjadikan perjalanan untuk mencari alternatif pikiran tentang kesemesta alam bermula. Atau dengan kata lain, tubuh, perempuan, dan alam semesta adalah lonceng yang menggugah kesadaran bahwa modernitas mengenal prinsip saturasi.

Untuk masyarakat pascaindustrial (baca:barat), di mana kerangka gerak masyarakat terletak pada sistem produksi modern, kehadiran tubuh dan keperempuanan menjadi nyata dikarenakan keikutsertaannya dalam pasar kerja dengan menjadi kelas pekerja dan meninggalkan rumah sebagai ruang eksistensinya; membayar pajak sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara; dan hadir sebagai warga negara dengan menikmati tunjangan dan kemudahan serta haknya secara politik. Artinya, perjalanan tubuh dan keperempuanan dalam negara tidak lagi membuat keberadaannya terbedakan dari kehadiran pikiran maupun laki-laki. Perempuan adalah individu, dan

dalam seluruh tata kelola produksi maupun kenegaraan, perempuan maupun laki-laki hanya direpresentasikan dalam angka<sup>5</sup>.

Sehingga ketika negara terganggu karena sistem produksi yang terhenti disebabkan pandemi dan menyebabkan angka tersebut menyusut, berkurang, maka dengan sendirinya naluri untuk menyambung nyawa dengan kekuatan pikiran dikerahkan kembali. Pada fase ini, pikiran bersifat *genderless*, di mana kehadiran dan keberadaan perempuan tidak lagi ditentukan oleh ketubuhannya yang bersifat oposisional terhadap laki-laki.

Di Indonesia<sup>6</sup>, skenario justru bergerak dengan narasi yang berbeda. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara bekas jajahan dengan struktur kemasyarakatan yang solid dan canggih pada tiap suku masyarakat yang sudah terbentuk jauh sebelum penjajah datang. Sayangnya, menjadi modern adalah naluri yang bertumbuh sebagai representasi atas seluruh perasaan terkalahkan selama sekian abad (*resentment*), dan bukan kebutuhan untuk merumuskan ulang Indonesia pascapenjajahan. Dasar dari watak seperti ini kemudian menjadikan gagasan modernitas semata-mata ditilik dari kemajuan ekonomi, salah satunya dengan membentuk kelas pekerja atau

5. Jean-Paul Sartre menggambarkan masyarakat modern hanya melahirkan kesamaan atau keseragaman. Satu-satunya yang membuat seseorang berbeda dengan manusia yang lain adalah nomor dalam catatan kependudukan, yang berlaku untuk seluruh urusan administrasi kenegaraan, yang disebutnya sebagai fenomena *sérialité*.

6. Secara khusus saya memakai kerangka pikiran dalam penelitian untuk disertasi saya tentang Representasi Sosial Perempuan dan tempat perempuan pada masyarakat Jawa. Lihat Risa Permanadeli (2015), Dadi Wong Wadon Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern, Sleman: Pustaka Ifada



sistem produksi industrial. Sehingga menjadi modern ditempuh dengan melanjutkan pendekatan eksploitatif pada alam sebagaimana perjalanan beberapa abad di bawah kekuasaan penjajah.

Ketika barat bergulat menemukan modernitas untuk menemukan kehidupan yang bertumpu pada alam, bangsa-bangsa yang menghuni kepulauan Nusantara justru masih bergulat dengan kekalahan. Modernitas (sebagai rumusan pikiran) tidak pernah menjadi sebuah temuan pikiran yang wataknya endogen. Sementara tubuh dan keperempuanan hidup dalam narasi dan tradisi kultural yang tidak memilah secara hierarkis pikiran atas tubuh, laki-laki atas perempuan. Sehingga kemudian dapat dipahami bahwa alam tetap menjadi pilar utama yang menentukan seluruh haluan perjalanan menjadi manusia, meski berbenturan dengan konsep modernitas barat. Skenario hidup berbangsa dalam kerangka ini kemudian menjelaskan banyak hal yang selanjutnya akan saya sebut sebagai *elemen*.

*Pertama*, pikiran tidak pernah menjadi mercusuar kehidupan bersama. Akan tetapi pada saat yang sama (secara formal) masyarakat mengusung seluruh gagasan modern tentang cara mengatur hidup bersama (dalam negara) dengan mengambil *template* pikiran sebagaimana masyarakat barat. Hal tersebut terjadi semata dikarenakan kita percaya bahwa barat adalah sebuah model ideal kemajuan dan peradaban. Sehingga Indonesia dengan begitu akan disebut sebagai negara modern.



*Kedua*, arus awal yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan abad, tetap hidup dengan cara dan wataknya sendiri dalam keseharian masyarakatnya. Penjajahan tidak pernah menghapus genetika sosial kita sebagai makhluk timur yang senantiasa bergerak dalam ruang mental yang lain meski kita menyatakan diri sebagai negara modern. Dalam kerangka ini, meskipun genetika tersebut tidak pernah tampak secara visual karena kita bergaya sebagaimana *template* barat, akan tetapi muncul ketika kita berhadapan dengan persoalan yang menyangkut siklus hidup. Leluhur dan kematian tetap merupakan hal yang sakral. Sehingga gagasan alam sebagai ruang kosmik tetap terjaga. Kondisi ini membuat genetika sosial kita tersemaikan sekaligus terlupakan.

*Ketiga*, kedatangan elemen baru seperti agama dan ilmu pengetahuan tidak menggugurkan hal kedua karena elemen-elemen tersebut tidak menemukan *platform* mental untuk menyusup menjadi bagian keseharian dan merumuskan kehadirannya sebagai *common sense*<sup>7</sup> dalam masyarakat Indonesia. Sehingga elemen pengetahuan dan agama tetap menjadi makhluk asing untuk bangsa ini. Ketiga temuan tersebut hidup secara tumpang tindih dan kadang

---

7. Gagasan ini bersifat debatable mengingat heterogenitas masyarakat Indonesia yang terlalu tinggi. Akan tetapi, dalam kerangka pikiran sebagaimana yang saya cantumkan dalam catatan sebelumnya, bahwa kehadiran elemen-elemen tersebut secara perspektif Representasi Sosial bersifat pinggiran sehingga selalu cair dan mudah digoyahkan. Sementara tradisi hidup dengan mengacu pada kebudayaan leluhur berfungsi sebagai struktur inti, yang bisa tidak terlihat atau bahkan bisa tidak aktif (dormant), akan tetapi memiliki kepekaan untuk berfungsi kembali secara efektif menggerakkan ketidaksadaran.



saling menyandera. Sementara kita tidak pernah mencoba mengurai untuk memahami keruwetannya.

Berfungsinya masyarakat Indonesia dalam tiga alur di atas semestinya bisa membantu kita untuk memahami berbagai persoalan selama maupun pascapandemi. Sehingga kemudian kita mampu meletakkan ulang gagasan hidup desa dengan asumsi, perempuan adalah representasi dari alam yang tidak pernah menjauh dari kehidupan masyarakatnya. Beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait persoalan tersebut, yaitu:

*Pertama*, desa tidak bisa dimengerti dalam pengertian sosiologis tentang linearitas pertumbuhan yang mewakili keterbatasan. Artinya, desa bukan sebuah oposisi atas kota. Oleh karena itu, perspektif desa-kota tetap harus dibaca dalam evolusi masyarakat kita sendiri. Seperti kita ketahui, pandangan peyoratif terhadap desa merupakan warisan prasangka yang kita simpan untuk melanggengkan superioritas barat (baca: kota yang dibangun oleh penjajah), yang selalu melihat masyarakat pribumi terbelakang, kampungan, tidak beradab, primitif, dan sebagainya. Sehingga pengertian desa dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia menjadi oposisi atas ruang kekuasaan, bukan oposisi atas ruang sosiologis (lahirnya kelas pekerja dan kesadaran politik) dan ruang kultural kota (pembentukan selera). Kota dengan sendirinya tidak bisa disimbolkan sebagai mercusuar peradaban. Desa dan kota untuk masyarakat Indonesia adalah representasi dari ketumpang-tindihan tiga elemen di atas. Sebuah kota hadir ketika volume tumpang tindih yang menghasilkan



keruwetan tinggi, sementara desa diasumsikan dengan volume keruwetan yang relatif lebih rendah. Sehingga pembeda antara desa terhadap kota semata skala keruwetannya.

*Kedua*, karena desa dirumuskan sebagai alter-ego kota, maka dengan sendirinya keberadaan perempuan, tubuh dan alam semesta, tidak perlu mempersoalkan perbedaan istilah desa dan kota. Semestinya kita secara lebih waspada harus memperhatikan skala keruwetan antara desa dan kota untuk kemudian mengurangi keruwetan tersebut.

*Ketiga*, selama hubungan desa-kota secara mental tetap mengacu pada pengalaman penjajahan ketimbang rumusan perubahan sosial masyarakat, maka pola kekuasaan yang direpresentasikan oleh kota akan tetap menjadi sumber keruwetan. Berkuasa didefinisikan dengan menduduki jabatan, yang artinya memiliki akses pada pengelolaan aset bersama. Akses tersebut beridentifikasi dengan gratifikasi, korupsi, nepotisme, dan lainnya. Sehingga dengan sendirinya, keruwetan semakin bertumpuk karena mewakili prasangka barat tentang masyarakat dunia ketiga. Di lain hal, perempuan yang hidup dalam ruang ini adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Kartini: terbelenggu dan terabaikan. Sehingga perempuan menuntut untuk berkuasa dan hadir dalam ruang publik. Gugatan untuk ikut andil dalam kekuasaan, yang merupakan representasi dari kota sekaligus representasi dari ingatan yang diwariskan ini, justru membuat keruwetan semakin bertumpuk. Keruwetan ini membaca fenomena perempuan dengan cara terbalik.



*Keempat, kenapa terbalik?* Karena narasi tersebut melupakan kenyataan perempuan sebagai makhluk kultural dalam kosmik yang tetap terjaga, disebabkan adanya campur tangan perempuan dalam menjalankan keseharian, dan tidak tersentuh elemen pengetahuan dan agama<sup>8</sup>. Sayangnya, perempuan yang ‘bekerja’ tersebut akan senantiasa terabaikan. Demikian juga halnya dengan perempuan yang bekerja membanting tulang sebagai tiang keluarga, baik di desa maupun kota. Mereka seakan luput dari pengetahuan, bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga sebuah entitas bernama Indonesia.

*Kelima*, akan tetapi, selalu ada cara untuk membaca keruwetan: perempuan berada pada posisi terabaikan dengan dua alternatif perjalanan, agama dan pengetahuan. Berpijak pada agama, maka perempuan akan semakin terabaikan karena harus tunduk pada hukum Tuhan. Atau menolak keterabaian dan menemukan kesetaraan dengan mengacu pada pengetahuan. Jika kita menerima watak empirik perempuan sebagaimana genetika sosial yang menghidupkan masyarakat Indonesia selama ini, sebenarnya perempuan adalah tiang

8. Pada pemerintahan pascakemerdekaan, beberapa sosok perempuan telah menduduki jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan. Misalnya, Maria Ulfah Santosa (1946-1947) sebagai Menteri Sosial, SK Trimurti (1947-1948) sebagai Menteri Buruh, jauh sebelum gerakan kesetaraan perempuan di Eropa disuarakan. Jauh sebelum bangsa-bangsa Barat memiliki presiden, kita telah memiliki presiden perempuan pertama. Hanya mengasumsikan keberadaan perempuan pada jabatan-jabatan yang terdapat pada elemen pertama, juga akan menyesatkan, karena pertanyaan berikut yang selalu bisa diajukan dari kenyataan empirik seperti ini adalah, apakah narasi tentang perempuan pada elemen kedua akan berubah atau pada elemen mana narasi tersebut berubah, menyusut atau menguat. Sekaligus juga apakah perhelatan yang sedang kita adakan saat ini dengan mengusung tema perempuan adalah representasi dari sejarah perempuan di Indonesia?



utama masyarakat. Kekuatan perempuan sebagai tiang masyarakat dijalankan justru dalam kesenyapan sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat biasa yang tidak tersentuh oleh elemen pertama maupun ketiga. Perempuan memperoleh dan mengasah kekuasaan dengan watak keterbatasan tubuhnya yang tidak pernah diartikulasikan oleh pengetahuan apapun. Semisal, keberhasilan Indonesia untuk keluar dari krisis tahun 1998 hendaknya dikaji dalam perspektif ini. Bahwa masyarakat bisa lepas dari cengkeraman krisis justru tanpa kehadiran negara, melainkan dikarenakan keberdayaan masyarakat itu sendiri. Keberdayaan tersebut sangat ditentukan oleh peran dan kerja perempuan di dalam ranahnya yang senantiasa terabaikan. Seharusnya, demikian pula halnya di masa pandemi ini: menemukan kesinambungan pemikiran perempuan dan desa di dalam tatanan masyarakat.

*Keenam*, keruwetan berikutnya terjadi ketika elemen ketiga, diadopsi sebagai DNA baru yang dianggap bisa menghapus genetika awal (elemen kedua) dan dibayangkan bisa melahirkan masyarakat baru dengan perempuan sebagai poros alternatif dengan pendekatan pengetahuan. Atau justru perempuan dianggap sebagai “makhhluk asing” yang harus dijinakkan (pendekatan agama).

Berhadapan dengan Covid-19, semua masyarakat, bangsa dan negara berada di titik yang sama. Semua orang masih percaya bahwa yang bisa kita lakukan hanyalah menanti dan melaluinya sampai pikiran berhasil menemukan vaksin penangkalnya. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita tegaskan dalam menghadapi pandemi ini,



perkara bagaimana kita bisa melalui itu semua jika ternyata seluruh yang kita bayangkan tentang diri kita sendiri semata keruwetan. Bersoal tentang desa-kota, perempuan-laki-laki, atau pikiran-tubuh (baca: spiritual), hanya mungkin kita mulai kalau kita bersedia memikirkan—sebagaimana barat berpikir bahwa modernitas mengenal saturasi, dan keruwetan tersebut juga mengenal saturasi. Pertanyaannya, akankah kita mampu mencapai titik tersebut? Pada Kongres Kebudayaan Desa inilah kita berharap. []



## Profil Penulis

Gelar doktornya diraih dengan riset yang fokus pada perkembangan pemikiran sosial dalam masyarakat non-Barat, khususnya di Indonesia. Hasil disertasi tersebut kemudian ia ringkas menjadi buku berjudul *Dadi Wong Wadon, Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*. Seperti tertulis dalam buku tersebut, ia menemukan bagaimana perspektif modern menurut perempuan Jawa. Yakni berpakaian sesuai dengan perkembangan zaman, berpikiran terbuka, dan berpendidikan.

Lebih jauh, Risa mencoba menggali konsep modernitas menurut perempuan Jawa, yang diawali dengan konsep modern menurut pandangan Barat. Tema ini menarik perhatiannya karena modernitas adalah properti masyarakat Barat yang diekspor secara komplet ke mana-mana. Melalui penelitian tersebut, ia menolak bias-bias kategorial dalam wacana feminisme Barat. Misalnya tentang perempuan sebagai korban kekerasan laki-laki, sebagai pihak yang secara universal tergantung, dan pernikahan merupakan proses kolonial.

Dr. Risa Permanadeli, Ph.D merupakan doktor Psikologi Sosial dari Ecole des Hautes en Sciences Socialis, Paris. Pada tahun 2005, ia mendirikan Pusat Kajian Representasi Sosial, sekaligus sebagai direktornya. Ia juga aktif mengajar psikologi sosial di Universitas Indonesia. Dan atas pengalaman panjangnya tersebut, Risa sempat dihadirkan sebagai saksi ahli bagi sidang kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaya Purnama pada 2017 lalu.





## Gerakan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jawa Tengah<sup>1</sup>

*Myra Diarsi<sup>2</sup>*

**P**andemi virus Corona, Covid-19 menjangkiti satu demi satu warga masyarakat hampir di setiap negara. Riuh aktivitas manusia yang hampir tidak pernah mati selama 24 jam pun menjadi

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 6: Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan disarikan oleh Asy Syaffa Nada A.
2. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah, peneliti di Women Research Institut dan Komisioner Komisi Nasional Perempuan. Tahun 1985 Myra Diarsi mendirikan Kalyanamitra, sebagai respons ketidakadilan pada perempuan. Tahun 1996 ia mendirikan Rumah Ibu sebagai wadah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di lembaga tersebut, Myra sebagai konselor sekaligus fasilitator dalam berbagai kegiatan penyadaran kritis.

surut. Kegiatan sekaligus pertemuan secara fisik mulai dibatasi demi meminimalkan penyebaran virus. Hingga tata kelola kehidupan baru kemudian diterapkan.

Dampak pandemi menggoyahkan berbagai tatanan kehidupan manusia. mulai dari sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan hingga lingkup pemerintahan. Banyak hal terdekonstruksi, sehingga perlu ditinjau ulang bagaimana prinsip dasar perubahan diberlakukan. Dekonstruksi terpenting dapat dimulai dari mengubah standar kerja aktivitas basis gender.

Pemahaman tentang aktivitas basis gender, umumnya, berangkat dari anggapan jika laki-laki lebih produktif dengan menggunakan pendapat sebagai indikatornya. Begitu juga standar sikap maupun atribut laki-laki yang diidentikkan dengan sikap agresif dan rasional. Laki-laki dipandang sebagai pemegang kewenangan tidak hanya untuk nafkah, melainkan juga kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Hal tersebut dinilai sangat perlu didekonstruksi, terutama ketika dihadapkan pada realitas di masa pandemi ini.

Untuk itu, kita perlu menata ulang dasar pemahaman aktivitas basis gender. Tidak hanya melihat laki-laki, perempuan pun merupakan agen perubahan. Kita perlu merefleksikan kembali peran perempuan, apa yang dikerjakan perempuan sekaligus daya yang dimiliki perempuan, terlebih saat menghadapi Covid-19.



## Berangkat dari Kesadaran dan Tindakan Sederhana

Kenyataannya, ketika Covid-19 menggoyahkan sektor industri, beberapa pegawai terpaksa dirumahkan, pengangguran meningkat, hingga persoalan kekhawatiran akan keberlangsungan hidup. Jumlah pengangguran di masa pandemi diperkirakan masih akan terus bertambah hingga mencapai angka 5,2 juta orang. Mau tidak mau, kondisi tersebut memaksa individu untuk kembali kepada prinsip dasar manusia sebagai makhluk sosial, bahu-membahu, bergotong royong, dan saling membantu.

Bagaimana pun juga, keberlangsungan hidup identik dengan *dapur ngepul*. Istilah tersebut memiliki makna bahwa dalam rumah tangga, dapur selalu digunakan sebagai sentra pemenuhan energi seluruh anggota keluarga. Peran perempuan penting dalam hal ini, tidak hanya semata ranah domestik dan doktrin patriarki, melainkan lebih kepada menggerakkan kesadaran untuk saling membantu *menyalakan* dapur orang lain di tengah pandemi virus Corona, Covid-19. Misalnya, melalui sebuah gerakan yang dilakukan masyarakat *Urban Care* Semarang, yang memang didominasi oleh perempuan.

Komunitas *Urban Care* Semarang menggerakkan kesadaran bersama melalui gerakan membagikan bahan pangan dengan menggantungkannya di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Gerakan ini diberi nama *Jogo Tonggo*, yang dalam bahasa Indonesia berarti *jaga tetangga*. Gerakan ini dimaknai sebagai aksi yang



implementatif untuk saling aktif menyediakan lumbung pangan bagi tetangga yang membutuhkan. Gerakan itu diinisiasi oleh kesadaran ibu-ibu lingkungan sekitar yang dikendalikan secara mandiri berbasis Rukun Warga (RW).

Gerakan *Jogo Tonggo* meluas hingga ibu-ibu pedagang di pasar. Pedagang kemudian berpartisipasi dengan mengumpulkan sayur dagangannya. Koordinator Relawan yang kemudian bertugas membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerakan-gerakan semacam itu, yang tumbuh dari kesadaran sebagai bagian dari sebuah sistem sosial menjadi pelajaran bagaimana memahami tingkah laku masyarakat tempatan dan kecerdasan lokalitas dalam menghadapi Covid-19.

Kecerdasan lokal meliputi semua bentuk, di antaranya pengetahuan atau pemahaman, keyakinan, wawasan, pandangan hidup hingga adat kebiasaan. Semua bentuk tersebut bersifat lokal dan dibutuhkan untuk berinteraksi ataupun memberi jalan kreatif dalam menghadapi situasi tertentu. Pada gerakan-gerakan kesadaran seperti *Jogo Tonggo*, kita belajar bahwa ketika menghadapi Covid-19, tingkah laku masyarakat tempatan tidak dipusingkan oleh berbagai urusan administrasi dan hal-hal normatif. Mereka cenderung lebih aplikatif dan bergerak dalam ruang lingkung masing-masing. Masyarakat tempatan menghadapi pandemi berangkat dari kesadaran jika semua harus hidup, yang artinya *dapur harus mengepul*.

Gerakan-gerakan seperti lumbung pangan, dapur umum, apotek hidup, hingga *family farming* atau *tanam yang engkau makan*,



*makan yang engkau tanam*, menjadi bagian dari langkah kemandirian yang digerakkan oleh pengetahuan-pengetahuan lokal. Gerakan kemandirian tersebut dinilai lebih berdikari dalam memperoleh sumber daya hidup.

Inisiatif-inisiatif berbagi pada langkah kerja konkret seperti *Jogo Tonggo* merupakan bentuk dari kepedulian terhadap orang lain yang berasal dari karakter kepedulian, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi fondasi kultur feminis yang digunakan sebagai pedoman perempuan dalam melaksanakan perannya, baik dalam ranah sosial maupun budaya. Karakter tersebut terus dilanggengkan guna menjaga keberlangsungan hidup, dan gerakan melalui kesadaran individu-individu hingga kelompok, perlu terus ditingkatkan sekaligus diberdayakan. Hal tersebut dikarenakan, salah satunya bisa dilihat lewat pepatah Jawa, *ora obah ora mangan* (tidak bergerak, tidak makan).

## **Dekonstruksi Relasi Sosial Menuju *New Normality***

Relasi sosial yang selama ini terlembaga di masyarakat perlu untuk didekonstruksi. Pandangan dan cara kerja patriarki yang melihat perempuan dan lelaki tidak setara harus segera ditinggalkan. Kontrak sosial baru kemudian diperlukan dalam menghadapi tatanan *new normality*, yaitu bertumpu pada standar pengukuran berbasis



karakter gender perempuan. Di antaranya karakter kepedulian, saling asah, saling asuh, dan saling asih.

Dekonstruksi relasi sosial sebagai bentuk implementatif dalam merawat kehidupan, berinteraksi secara sosial-spiritual, tetap bertumpu pada karakter kepedulian, saling asah, saling asuh dan saling asih. Sebab, kembali pada prinsip gender, karakter tersebut hadir hadir, tumbuh, dipercaya, dan diimani kepada dan oleh perempuan. Sehingga peran perempuan menjadi dominan dan setara dalam menghidupkan relasi dan tatanan sosial dalam era *new normality*. Salah satu penerapannya dalam mengatasi permasalahan angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia melalui gerakan *Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*. Gerakan ini langkah awal untuk mengedukasi pengetahuan seluruh lapisan masyarakat agar dapat mendata, mengenali, dan membantu warga yang hamil di lingkungannya yang mengambil peran dominan perempuan. Selain itu, gerakan tersebut juga membantu proses pemeriksaan, kelahiran, maupun segala tindakan yang sudah seharusnya didapatkan perempuan hamil agar proses kelahiran berjalan lancar sekaligus mengurangi angka kematian ibu.

Sayangnya, karakter tersebut selama ini hanya dipandang sebagai *template* tambahan dalam relasi sosial. Meskipun sudah menjadi rahasia umum jika perempuan memiliki peran dominan, terutama di masa krisis dan pandemi. Sehingga, sudah semestinya kontrak sosial baru dipraktikkan dalam masyarakat yang mengedepankan peran dan fungsi perempuan, sebuah kontrak sosial yang berhenti



menumpulkan, dan menaruh standar pada kerja-kerja yang tidak berbasis pada karakter gender perempuan. Jika relasi dan tatanan sosial masih meminggirkan kesetaraan dan peran sosial serta budaya perempuan dalam masyarakat, maka tatanan hidup baru akan bernilai sama tanpa perubahan

Dekonstruksi relasi sosial tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan. Sebelum menumbuhkan nilai-nilai karakter, perlu untuk mengenali bagaimana relasi sosial terbentuk dan dijalankan di masyarakat, modal sosial yang dimiliki masyarakat setempat, keberadaan lembaga dan pranata sosial mencakup kewenangan lembaga tersebut, terlebih peran dan kedudukan perempuan apakah aktif dalam menyampaikan aspirasi serta sadar secara politik. Hal tersebut menjadi poin penting sebelum melakukan dekonstruksi relasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari karakter sosial dan budaya masyarakat tempatan.

Meskipun umumnya masyarakat dibesarkan oleh *ilmu barat* dan berbasis kota, akan tetapi dalam mengenali relasi sosial masyarakat tempatan, memerlukan sikap rendah hati, menggugurkan atau melepaskan perspektif kota dan barat yang secara tidak langsung dapat memengaruhi pemikiran. Relasi sosial masyarakat tempatan membutuhkan pemahaman tanpa hal-hal yang mendistraksi.

## Memupuk Kepedulian, Membangun Kesadaran

Karakter kepedulian sebagai standar kerja perempuan, menjadi kunci bertahan hidup di era tatanan baru. Memupuk kepedulian, saling berempati, tidak dilakukan hanya dengan memberikan program-program yang berdasar pada anggapan bahwa orang-orang desa merupakan objek program pembangunan. Kita perlu menyadari jika masing-masing individu berkepentingan dalam proses pembangunan dan berperan sebagai subjek.

Perwujudan kepedulian dan pelibatan seluruh elemen masyarakat secara penuh, mau tidak mau harus menebang seluruh bentuk *power relation* dan praktik budaya patriarki yang mengakar. Setiap fenomena terutama yang berkaitan erat dengan *power relation* dan praktik budaya patriarki, perlu dilihat dan dikaji dari hulu hingga hilir. Praktik-praktik yang bersumber dari hulu (budaya, tradisi, stigma) ini, terus dilanggengkan dan memangsa perempuan sebagai penerima atau hilir. Oleh karena itu, sikap kepedulian untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan semua elemen dapat menciptakan potensi kolaborasi yang timbal-balik. Misalnya, gerakan *Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng* dan gerakan kepedulian lainnya di Jawa Tengah.

Berbagai gerakan sudah semestinya menanggalkan basis proyek pembangunan yang berorientasi pada prinsip modernitas dan meminggirkan peran perempuan. Langkah strategis yang perlu dilakukan, terutama oleh pembuat kebijakan, yakni mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat dalam menjaga kelanggengan



gerakan, dan bukan sekadar program memberi dan menerima bantuan. Contohnya kegiatan penelitian guna mendata penduduk miskin. Jika pendataan dilakukan hanya oleh orang-orang dari Badan Pusat Statistik (BPS), akan menunjukkan hasil yang berbeda jika melibatkan masyarakat tempatan.

Berbagai gerakan yang telah dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi dengan berpijak pada karakter kepedulian, menunjukkan jika perempuan menjadi benteng pertahanan dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Melalui berbagai gerakan, perempuan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Kebaikan yang menular menjadi bukti aksi nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari sebuah tindakan kecil dan sederhana tetapi dilakukan bersama. Untuk itu kita perlu bergerak, membangun kesadaran, kepedulian, belajar dari nilai-nilai masyarakat tempatan, serta mengubah relasi sosial yang masih menunjukkan ketimpangan gender. Sehingga berbagai gerakan yang hadir juga mampu mendorong kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap peran, kedudukan, dan pelibatan perempuan.[]



## **Profil Narasumber**

Perhatiannya pada isu perempuan dan feminisme telah tercurah sejak mahasiswa. Ia aktif dalam berbagai diskusi bersama buruh perempuan di seputar Jakarta. Bahkan skripsi serta tesisnya juga mengangkat topik serupa. Tahun 1985 Myra Diarsi mendirikan Kalyanamitra, sebagai respons ketidakadilan pada perempuan, baik akibat ketimpangan gender maupun kebijakan negara.

Selang 12 tahun, pada 1996 ia mendirikan Rumah Ibu sebagai wadah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di lembaga tersebut, Myra sebagai konselor sekaligus fasilitator dalam berbagai kegiatan penyadaran kritis. Ia juga melakukan riset tentang kekerasan perempuan di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Lalu menjadi komisioner di Komisi Nasional Perempuan, dan peneliti di Women Research Institut, kini Myra menjadi Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah.





# Revitalisasi Fungsi Desa dengan Pelibatan Perempuan<sup>1</sup>

*Wakhit Hasim<sup>2</sup>*

**D**esa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

- 
1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 6: Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan disarikan oleh Fiqih Rahmawati
  2. Pendiri Yayasan Wangsakerta di Cirebon, 2017. Akademisi di IAIN Syekh Nurjati sejak tahun 2009

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Di masa-masa kerajaan kecil, desa dikenal dengan istilah *kuwu* (menggambil julukan untuk kepala desa), *pakuwon*, kampung atau desa. Desa memiliki kewenangan penuh terhadap sumber daya alam dan sumber daya sosial yang dimiliki. Kerajaan-kerajaan kecil yang terdiri dari desa-desa ini kemudian berfederasi, yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki posisi kuat di pemerintahan dan menjadi kerajaan-kerajaan Nusantara.

Di desa, terjadi dua proses yaitu proses penguatan dan juga proses perusakan desa. Kedua proses ini memiliki dialektika yang panjang dan telah terjadi perusakan desa yang besar sepanjang sejarah Indonesia. Misalnya, ketika bangsa-bangsa barat datang dan membawa nilai-nilai baru dalam masyarakat. Nilai komersial di bidang ekonomi, hingga nilai individu menyebabkan munculnya hak individu. Kemunculan hak individu menyebabkan lahirnya kepemilikan pribadi, yang membentuk akumulasi modal dalam kegiatan ekonomi menjadi semakin kuat. Desa yang identik dengan kepemilikan bersama dan nilai komunal menjadi terpinggirkan dan terkikis habis. Dinamika antara komunalisme dan individualisme tersebut masih terjadi hingga sekarang.

Pemerintah di tahun 2014 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Menurut Muhammad Shohibuddin<sup>4</sup> dalam *Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*, UU

---

3. Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa,

4. Shohibuddin, Mohamad. 2018. *Perspektif Agraria Kritis; Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.



Desa ini berhasil membalikkan secara drastis relasi negara-desa. Desa bukan lagi menjadi bagian dari rezim otonomi daerah, melainkan merupakan sebuah pemerintahan masyarakat yang dapat diatur melalui sistem yang beragam, termasuk di dalamnya desa adat.

Undang-undang Desa dilihat sebagai peluang untuk mengembalikan supremasi desa, di mana desa memiliki wewenang atas rencana anggaran dan pelaksanaannya, serta wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Di sisi lain, kegiatan pembangunan yang dimulai sejak era orde baru hingga era reformasi memberikan dampak destruktif terhadap desa, baik secara teritorial maupun sosial dan budaya. Terutama ketika Indonesia menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Strategi percepatan pembangunan untuk mendukung program MEA menimbulkan kerusakan, baik dari sisi sumber daya alam, maupun sumber daya sosial, terutama bagi masyarakat desa.

## **Posisi Perempuan dan Anak**

Istilah desa dan kota mencuat dengan segala perspektif modernitas yang diimplementasikan dalam ruang pembangunan nasional. Meski demikian, perbedaan nilai-nilai antara desa dan kota bisa dikenali melalui sistem kohesi, homogenitas, sistem kepemilikan bersama dan sistem transaksi nonkomersial yang terjadi, baik di ranah spasial maupun sosial.

Kohesivitas merupakan suatu kesatuan atau kepaduan dalam sebuah kelompok sosial. Desa memiliki tingkat kohesivitas yang cukup tinggi dikarenakan mitos dan nilai yang diikat oleh institusi sosial. Sementara di kota, yang terjadi justru sebaliknya. Desa juga memiliki sistem kepemilikan bersama yang masih terjaga. Meskipun kini kepemilikan sudah menjadi individu, tetapi ruang-ruang publik masih menjadi milik bersama yang terjaga dengan baik. Hal ini yang kemudian disebut sebagai relasi gotong royong.

Sistem transaksi nonkomersial di desa juga masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang bersifat saling bantu. Sementara sistem transaksi kota lebih bersifat komersial. Sehingga desa memiliki corak produksi, cara hidup, nilai dan interaksi yang terjaga, tetapi situasi teknologi bersifat desa. Meski perbedaan antara nilai kota dan desa sangat tipis, jarak ini memiliki dampak yang cukup besar bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Perempuan dan anak merupakan isu yang bersifat universal, tidak hanya di masa pandemi. Sementara isu desa dapat dipahami sebagai ruang spasial dan ruang sosial. Desa sebagai ruang spasial meliputi keluasan, jalan, dan tata guna lahan. Sementara desa sebagai ruang sosial terdiri dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program terhadap perempuan dan anak tercakup dalam program desa yang bersifat sektoral. Ketika berbicara mengenai penguatan perempuan dan anak, konteks desa berada dalam ruang spasial yang sangat padat, hal tersebut dikarenakan isu perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan dari



aspek ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan yang masuk ke dalam ruang sosial.

Selain itu, ketika memahami desa sebagai masyarakat, tidak bisa menyampingkan unsur komunitas yang ada di dalam desa. Desa terdiri dari kelompok-kelompok sosial, interaksi, nilai serta regularitas praktik dan lembaga. Kelompok sosial dalam hal ini adalah desa itu sendiri, *praktik* terdapat di dalam interaksi, sedangkan regulasi praktik merupakan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti lembaga perkawinan, lembaga adat hingga lembaga agama.

Ketika berbicara mengenai perempuan dan anak dalam gerak perubahan sosial desa, perlu dipahami ekosistem desa dari segala aspek, karena perempuan dan anak berada dan berkelindan di dalam konteks ini.

## **Situasi di Cirebon**

Desa Setupatok, kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan pengamatan, memiliki situasi sosial ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Akibatnya, semua aspek di dalam tatanan desa termasuk keluarga merasakan dampaknya. Ayah, yang dalam mitos dan kultur superioritas laki-laki, memiliki tanggung jawab dalam ranah publik, sehingga memilih untuk bekerja di kota dan meninggalkan keluarga di desa. Ketika keluarga kehilangan figur ayah dan suami, institusi publik lainnya di desa seperti RT dan RW maupun musyawarah yang terkait dengan

keberlangsungan desa, turut hilang. Akibatnya, fungsi-fungsi kemasyarakatan dan kohesivitas desa pun terganggu.

Perempuan kemudian berada dalam posisi dengan beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan stres hingga depresi. Di desa Setupatok sendiri per 2020 terdapat delapan orang perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan akibat tingkat stres yang sangat tinggi. Tak hanya itu, anak-anak yang kehilangan figur ayah cenderung memilih putus sekolah, turun ke jalan, yang menyebabkan tingkat anak meningkat.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di desa Setupatok, melainkan hampir di semua daerah sup urban. Wilayah sub urban dapat diartikan sebagai wilayah peralihan atau wilayah desa-kota. Ketika desa memasuki proses transformasi ke kota (kotanisasi desa), kemiskinan struktural menjadi persoalan yang harus dihadapi.

Kemiskinan struktural menurut Selo Soemardjan<sup>5</sup> dalam *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*, diartikan sebagai kemiskinan yang dialami oleh golongan masyarakat tertentu karena struktur masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kemiskinan ini ditandai dengan beberapa hal, salah satunya di ranah ekonomi. Ketika mereka sudah terpapar kehidupan kota yang berbeda dengan desa, maka tingkat konsumerisme meningkat,

---

5. Soemardjan, Selo, dkk.1980. *Kemiskinan Struktural; Suatu Bunga Rampai*. Malang: HIPIS.



seperti godaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti transportasi dan alat komunikasi meningkat.

Selain itu, hak kepemilikan atas barang juga terdampak. Tanah-tanah yang awalnya dimiliki secara komunal beralih menjadi kepemilikan individu. Masyarakat desa dengan mudah menjual lahan. Alih kepemilikan ini berdampak pada perubahan profesi dan mata pencaharian. Jika biasanya masyarakat desa identik dengan corak produksi bertani, karena perpindahan kepemilikan lahan memaksa masyarakat desa untuk mengadu nasib ke kota, dengan menjadi buruh, misalnya.

Masyarakat yang beralih profesi dan berpindah ke kota dengan berbagai masalah yang ditinggalkannya berakibat pada budaya tempatan atau yang kemudian dikenal dengan *alih budaya*. Alih budaya memiliki definisi yang lebih luas terkait dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nilai pertanian berubah menjadi nilai buruh, kepemilikan sudah berubah serta proses transaksi menjadi lebih bersifat komersial secara keseluruhan.

Fenomena tersebut menuntut pentingnya revitalisasi tatanan sosial di desa, terutama yang mengedepankan peran perempuan dan anak, yang memikul beban ganda. Oleh karena itu, kehadiran yayasan Wangsakerta Cirebon di tengah masyarakat desa Setupatok bertujuan untuk merevitalisasi fungsi desa melalui fungsi tanah yang dalam hal ini adalah fungsi pertanian. Pertanian di desa merupakan salah satu ketahanan pangan yang harus diupayakan, meski kenyataannya ketahanan pangan melalui pertanian bergeser dikarenakan tanah-tanah sudah beralih kepemilikan.



Yayasan Wangsakerta dalam praktiknya tidak memfokuskan kegiatan pada perempuan dan anak dengan berbagai pertimbangan yang berhubungan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Program awal revitalisasi desa yayasan Wangsakerta lebih aktif mengajak kaum laki-laki untuk kembali mengolah tanah, baik yang ditinggalkan pemilik, tanah yang bebas diolah, maupun tanah yang masih menjadi milik pribadi.

Sayangnya, secara kuantitas jumlah laki-laki di desa tidak memadai dikarenakan laki-laki usia produktif lebih memilih untuk bekerja di kota. Sementara ketika melibatkan perempuan secara penuh, yayasan terkendala dengan berbagai kondisi sosial dan psikologis yang dialami Perempuan. Akhirnya, yayasan Wangsakerta lebih menjangka anak-anak dengan memberikan wadah untuk belajar bersama di *Sekolah Alam Wangsakerta*.

Strategi sosial revitalisasi fungsi desa dimulai dari agen anak-anak yang kemudian secara estafet kepada perempuan. Anak-anak dinilai lebih mampu menarik perempuan (ibu) untuk turut berpartisipasi. Hal ini tak lepas dari peran tradisional perempuan di desa sebagai penjaga keluarga, pengolah sumber daya keluarga serta perawat lingkungan.

Untuk strategi spasial, yayasan Wangsakerta melakukan pemetaan wilayah sejak tahun 2018. Dari hasil pemetaan tersebut, diketahui bahwa untuk merevitalisasi pertanian, harus merevitalisasi ekosistem air terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tanah-tanah di daerah tersebut menjadi kering karena sumber air sudah



tidak ada dan tidak terjaganya ekosistem alam. Persoalan yang berhubungan dengan ekosistem air tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah dengan memberikan data-data terkait yang bisa digunakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Pendataan melalui pemetaan spasial dan sosial harus diperhatikan untuk dijadikan basis penganggaran dan program selanjutnya. Pendataan untuk Musrenbang ini kemudian digunakan dalam program pengadaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).[]



## Profil Narasumber

Jika dihitung, jumlah laki-laki yang fokus memperjuangkan kesadaran gender bisa jadi lebih sedikit dibanding perempuan. Wakhit Hasim salah satu dari yang sedikit tersebut. Dalam sebuah esainya berjudul “Kepemimpinan Perempuan, Belajar dari Desa”, ia menyatakan bahwa ketimpangan gender di desa tidak begitu mencolok. Tapi pada kelas elit, sifat dan sikap patriarki lebih terasa, apalagi dengan jabatan sosial politik.

Konsen pada isu gender, menjadikan ia mendirikan Yayasan Wangsakerta di Cirebon pada tahun 2017. Programnya berupa pendekatan pengorganisasian sosial yang telaten. Awalnya, para ibu muda tidak percaya diri pada kemampuannya. Namun, saat pendampingan berjalan dan mereka dilatih untuk saling bekerja sama, potensi mereka muncul. Hal itu tumbuh berkat interaksi pendamping yang kukuh dan berkelanjutan. Kini, Wakhit Hasim menjadi dosen di IAIN Syekh Nurjati, yang telah ia jalani sejak 2009.





# Mewujudkan Desa yang Berintegritas dan Inklusif Melalui Penguatan Perempuan dan Anak<sup>1</sup>

*Emma Husein<sup>2</sup>*

Untuk mencapai masyarakat dengan sistem sosial yang ideal, pembangunan harus dilakukan secara merata dan melibatkan seluruh elemen, tidak hanya berpusat pada kota dengan melibatkan

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 6: Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan disarikan oleh Kusharditya Albi
2. Emma Husein merupakan ketua Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sulawesi Selatan. Ia juga anggota Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

kelompok sosial tertentu. Keterlibatan dan partisipasi desa beserta seluruh elemen sosial di dalamnya, sayangnya belum muncul sebagai unsur penting pembangunan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Padahal seperti yang dikemukakan Rahardjo Adisasmita<sup>4</sup> melalui bukunya yang berjudul *Membangun Desa Partisipatif*, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Desa memiliki peranan penting dalam partisipasi pembangunan nasional setelah diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.<sup>5</sup> Salah satu bentuk partisipasi desa dalam pembangunan nasional dilakukan dengan membentuk desa yang berintegritas dan inklusif. Selain itu, keluarga terutama perempuan, berperan penting untuk melakukan perubahan, untuk membentuk masyarakat desa yang baik. Peran perempuan tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang tentang desa. Artinya, perempuan memiliki ruang dalam proses-proses pembangunan desa.

Berbicara mengenai peran perempuan, Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Semua aspek, dari unit terbesar hingga unit terkecil yakni keluarga, gagap beradaptasi. Tentu saja perempuan dan anak mendapat tantangan yang lebih sebagai salah satu kelompok rentan dan sering berada dalam posisi subordinat. Padahal jika kita

---

3. UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

4. Adisasmita, Rahardjo. (2006), *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

5. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa



ingin mengkaji lebih jauh, pendidikan dan penguatan nilai-nilai bermasyarakat dan bernegara justru dimulai dari keluarga, yang di dalamnya peran perempuan, dalam hal ini ibu, sangat dominan.

Tulisan ini mencoba menguraikan langkah-langkah strategis yang dilakukan perempuan bersama masyarakat di desa Mallari, Bone, Sulawesi Selatan, dalam gerakan *Saya Perempuan Anti Korupsi* (SPAK). Gerakan ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan punya potensi menjadi agen pencegahan korupsi sekaligus pelaku korupsi. Oleh karena itu, berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat diperlukan agar perempuan bisa diandalkan dalam mencegah penyebaran virus korupsi guna mewujudkan sebuah desa yang berintegritas dan inklusi melalui penguatan perempuan dan anak<sup>6</sup>.

## **Desa Layak Anak**

Berbicara mengenai peran perempuan dalam pembangunan desa, dapat dilihat melalui konsep Kabupaten dan Kota Layak Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kabupaten atau kota Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh

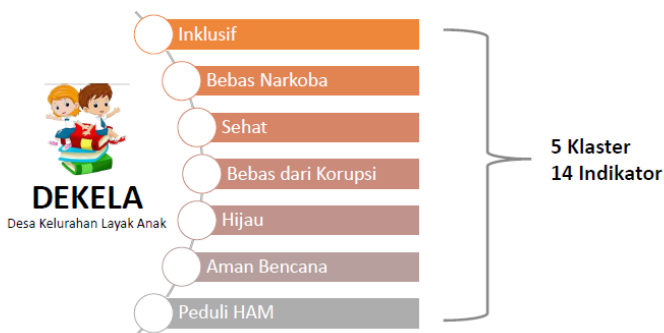
---

6. Agustina Ali Bilondatu. 2018. Ekspektasi Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*. Volume 1 No 2. <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/372>. Diakses tanggal 7 Juli 2020.

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak<sup>7</sup>.

Kabupaten atau Kota Layak Anak dikembangkan merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) atau yang lebih dikenal dengan UNCRC (*United Nation Convention on the Rights of the Child*) dan diratifikasi melalui Keppres No.36 tahun 1990<sup>8</sup>. Kabupaten dan Kota Layak Anak sendiri dibagi menjadi lima kluster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan pengasuhan dan keluarga alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus yang terdiri dari 24 indikator. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi konsep Desa atau Kelurahan Layak Anak (Dekala), yang bertujuan menciptakan desa yang bebas dari kekerasan terhadap anak.

#### DEKELA SEBAGAI BAGIAN DARI “ SISTEM KAB/KOTA DI INDONESIA “



Gambar 1. Tujuh dari 14 Indikator Dekala  
Sumber: Dokumen Ema Husein

7. <https://kemenpppa.go.id>

8. <https://www.unicef.org>

Indikator dalam Dekala menyesuaikan dengan kondisi desa, dengan 18 indikator di tingkat kecamatan dan mengacu pada 14 indikator di tingkat desa. Hal tersebut sebagai upaya penguatan anak untuk mencapai desa yang inklusif dan berintegritas. Selain itu, Dekala dinilai perlu untuk menghadirkan isu inklusi, bebas korupsi, bebas narkoba, peduli lingkungan, aman dari bencana, dan peningkatan kepedulian terhadap hak perempuan dan anak.

## **Desa Inklusif dan Berintegritas**

Desa Inklusif dapat dimaknai sebagai; (1) Desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; (2) Desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibilitas untuk semua orang; (3) Desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keragaman dan keberbedaan; (4) Desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan keragaman yang ada; (5) Desa tempat saat semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama.<sup>9</sup>

Semua orang yang berada dalam lingkungan desa inklusi berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta mendapatkan hak dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Orang yang berada dalam lingkup desa inklusi dituntut untuk menjadi masyarakat

---

9. --, 2016, *Desa Inklusif: Konsep dan Implementasi*, dalam Merdesa, Edisi 3, 2016. Yogyakarta: Infest

inklusi, yaitu masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri, baik keberagaman agama, budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, termasuk perbedaan fisik dan mental atau disebut disabilitas. Jika semua bentuk keragaman bisa diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh setiap komponen masyarakat, maka masyarakat akan mampu membangun sistem layanan, interaksi dan fasilitas yang memudahkan bagi semua orang, termasuk orang-orang yang mempunyai hambatan dan kebutuhan khusus. Untuk poin terakhir, Peraturan Desa (PERDES) No 8 Tahun 2019 juga mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat desa.<sup>10</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>11</sup> mendefinisikan integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Menurut Mulyadi<sup>12</sup> dalam buku *Balanced Scorecard*, integritas merupakan kepatuhan yang tidak mengenal kata kompromi dalam menganut nilai moral, serta sangat mengesampingkan penipuan dan pemanfaatan.

Penting bagi desa menerapkan nilai-nilai luhurnya untuk menciptakan sebuah integritas. Empat indikator yang bisa digunakan

---

10. Peraturan Desa No 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

11. Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

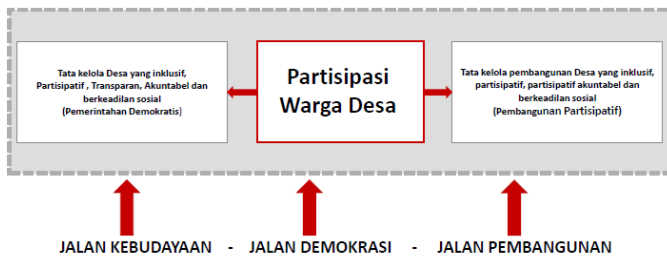
12. Mulyadi. (2001). *Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.



untuk mencapai desa berintegritas menurut Solomon<sup>13</sup> dalam *Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business*, yaitu loyalitas, keserasian, kerja sama, dan dapat dipercaya. Peran seluruh elemen masyarakat desa, termasuk perempuan, menentukan keberhasilan capaian desa yang berintegritas.

Peta Jalan Pemberdayaan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa menyebutkan jika pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan. Ketiga hal tersebut dinilai mampu menciptakan masyarakat desa yang inklusif dan berintegritas.

#### MENUJU DESA YANG INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS



Gambar 2. Menuju Desa Inklusif dan Berintegritas  
Sumber: Dokumen Ema Husein

Konsep desa inklusif dan berintegritas akan terwujud jika ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat desa. Partisipasi dimulai dengan langkah-langkah praktis bagaimana masyarakat

13. Solomon, R.C. (1993). *Ethics and Excellence Cooperation and Integrity in Bussines*. New York: Oxford University Press

desa menginventaris, merencanakan, dan merancang kebutuhan dan kepentingan mereka sebagai bagian dari desa secara sosial, budaya, dan administratif. Partisipasi ini nantinya akan melahirkan bagaimana tata kelola desa yang inklusif, dan transparan. Sehingga proses pembangunan di desa lebih maksimal karena mampu mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inklusif, dan loyalitas.

## **Peran Perempuan melalui *Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)* dalam Membentuk Desa Berintegritas dan Inklusif**

Korupsi menjadi persoalan yang seakan tak berujung di Indonesia. Pasca reformasi 1998, berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Akan tetapi praktik-praktik korupsi masih sangat banyak jumlahnya. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah penyidikan, penyelidikan, tuntutan, dan eksekusi dari tahun ke tahun terus meningkat. Misalnya saja dari tahun 2016 jumlah penyelidikan bergerak dari angka 96, 123, dan 164 di tahun 2018 dengan total kasus sejak 2005 sebanyak 1.135 kasus penyelidikan. Sementara jumlah eksekusi tindak pidana korupsi sejak tahun 2016 meningkat dari angka 81, menjadi 83, dan 113 di tahun 2018 dengan total eksekusi 610 kasus sejak tahun 2005.<sup>14</sup> Semakin meningkatnya praktik-praktik korupsi ini, salah satu sebabnya terjadi

---

14. Data statistik laman situs web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)



dikarenakan masih minimnya peran masyarakat. Selain itu, korupsi menjadi kejahatan yang sifatnya sistemik dan endemik. Siapa saja berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

*Saya Perempuan Anti Korupsi* (SPAK) merupakan sebuah gerakan yang lahir atas keprihatinan yang disampaikan oleh sebuah survei yang dilakukan KPK tahun 2012 – 2013 di kota Solo dan Yogyakarta. Studi ini menyajikan fakta bahwa ternyata hanya 4% orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya. Kejujuran yang dimaksud di sini bukan kejujuran dalam arti definisi kejujuran, tetapi lebih kepada bagaimana kejujuran tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua tidak bisa mengaitkan bahwa menyerobot antrean adalah bentuk-bentuk perilaku koruptif. Hal ini memberi pemahaman bahwa korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Definisi ini bukan hanya memberikan gambaran pada apa yang sering diliput media sebagai tindak pidana korupsi, tetapi juga menyoroti masalah-masalah perilaku-perilaku koruptif. Dan bila kita percaya bahwa tindakan koruptif itu adalah bentuk atau evolusi dari perilaku-perilaku koruptif sejak kecil, maka fakta ini sungguh menakutkan.

Dasar pengembangan model dalam gerakan SPAK berangkat dari asumsi kurangnya kesadaran pemahaman mengenai hal-hal yang bisa menjadi bibit lahirnya praktik-praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan kenyataan bahwa individu dapat memberikan perubahan yang lebih luas, baik positif maupun negatif. SPAK



melihat jika peran keluarga sangat besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Keluarga sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat berperan dalam pengenalan kehidupan dan nilai-nilai pada anak-anak. Keluarga juga memiliki fungsi kontrol terhadap tindakan-tindakan korupsi. Lebih spesifik, riset yang dilakukan oleh KPK tersebut menunjukkan jika ibu dalam lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak.

**MENGENAL SPAK**

**SAYA, PEREMPUAN ANTI KORUPSI!**

**Mengapa Perempuan?**  
Ibu/Perempuan dianggap memegang peranan kunci dalam pendidikan moral keluarga

**Apa dasar Pengembangan Model SPAK?**  
**Asumsi 1:** kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai apa yang membentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat  
**Asumsi 2:** bahwa individu dapat membawa perubahan yang lebih luas

**SPAK ADALAH TENTANG PERUBAHAN GENERASI/KOLEKTIF** dimulai dari keluarga, lalu jaringan yang lebih luas, melalui komunitas, tempat kerja dan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 3. Mengenal *Saya Perempuan Anti Korupsi* (SPAK)  
Sumber: Dokumen Ema Husein

Ibu sebagai basis pendidikan pertama bagi setiap anak diharapkan mampu menanamkan nilai dan sikap kejujuran. Jika hal itu terjadi, maka akan terbentuk bibit generasi yang terbebas dari perilaku yang korup. Oleh karena itu, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) memulai perubahan dari lingkungan terkecil yang kemudian



nantinya akan berpengaruh pada lingkungan yang lebih luas. SPAK menjadi gerakan kolektif, yang menasar perubahan cara berpikir dan pola perilaku generasi yang mulai dari lingkungan keluarga, melalui peran perempuan sebagai ibu.

SPAK dalam setiap gerakannya mendorong penanaman *sembilan nilai* (Semai) pada anak-anak, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kegigihan, keberanian, kepedulian, keadilan, kerja sama, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Selain itu, SPAK juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kampanye anti korupsi bagi masyarakat, di antaranya pemberian pin dan buku pengenalan bertajuk *Saya Perempuan Anti Korupsi*, serta sosialisasi melalui *board game*.

Pin *Saya Perempuan Anti Korupsi* bertujuan agar siapa pun yang mengenakannya diharapkan memunculkan kesadaran, atau setidaknya membangun alam bawah sadar bahwa penegakan anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Buku *Perempuan Anti Korupsi* berfungsi sebagai media pengenalan tentang seluk beluk korupsi, semisal bagaimana korupsi bisa muncul di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar siapa pun mampu mengidentifikasi, melakukan pencegahan hingga melaporkan praktik-praktik korupsi yang ditemui di masyarakat. Buku ini juga menjelaskan tentang peran perempuan dan ibu dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan narasi yang mesti dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Pengetahuan mengenai gejala, penyebab, praktik-praktik, serta bagaimana memutus mata rantai korupsi di masyarakat perlu dilakukan, salah

satunya melalui media permainan. *Board game* ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, melainkan semua kalangan.

### Desa Mallari sebagai Desa Berintegritas dan Inklusif

Masyarakat desa Mallari, Bone, Sulawesi Selatan, memiliki kesadaran bahwa perubahan dapat dimulai dari desa. Penerapan tiga prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dipercaya mampu menjadikan Mallari sebagai desa yang berintegritas. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama kepala desa sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, SPAK merasa perlu untuk aktif menyosialisasikan nilai-nilai anti korupsi dan menghadirkan agen SPAK dalam berbagai kegiatan desa.

Sebelum mengenal SPAK, masyarakat desa Mallari telah menerapkan sistem transparansi anggaran dengan pelibatan masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran desa yang dilakukan dengan bermusyawarah. Akan tetapi, laporan penggunaan dana desa tidak dilaporkan kepada publik, melainkan semata menjadi arsip di kantor desa. Sehingga kehadiran SPAK di tengah-tengah masyarakat Mallari semakin mendekatkan masyarakat dengan praktik-praktik transparansi, seperti pemasangan papan informasi mengenai standar pelayanan dan hasil pembangunan. Semua rincian dana anggaran desa dicetak dan ditempatkan di titik yang mudah diakses dan dibaca masyarakat. Hal ini berimbas pada perubahan perilaku para perangkat desa.



Untuk mewujudkan desa inklusif, desa Mallari telah mulai memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak itu dilakukan dengan memperhatikan sarana dan prasarana publik yang ramah bagi setiap masyarakat di desa Mallari. Selain itu, desa Mallari juga melibatkan masyarakat disabilitas dalam proses perencanaan anggaran desa. Di desa Mallari, terdapat beberapa tahapan proses perencanaan anggaran desa, dan semua masyarakat desa memiliki andil dalam proses perancangan anggaran. Masyarakat disabilitas kemudian juga dilibatkan sebagai kader Posyandu, kader Penyuluh, serta pelibatan dalam badan kepengurusan Forum Anak Desa Mallari. Masyarakat disabilitas juga diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan *soft skills*, seperti membuat kerajinan *Songkok to Bone*, maupun berbagai *workshop* yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.

Desa Mallari terus melakukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan peran perempuan dan anak sebagai agen pencegahan korupsi, penguatan masyarakat melalui kontrol sosial, dan mendorong kebijakan yang berkontribusi pada upaya pencegahan anti korupsi. Hal ini merupakan salah satu cara menuju desa inklusif dan berintegritas melalui jalan kebudayaan. []



## **Profil Narasumber**

Korupsi harus dicegah sejak lingkungan terkecil. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena itu Ema Husein percaya bahwa perempuan punya potensi menjadi agen pencegahan korupsi. Syaratnya, harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar perempuan bisa diandalkan untuk mencegah penyebaran beragam bentuk korupsi. Dan upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, harus berjejaring dengan organisasi atau komunitas yang sepaham.

Ema merupakan ketua Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sulawesi Selatan. Ia juga anggota Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Menurutnya, sosialisasi anti korupsi yang dilakukan tidak hanya menasar perempuan dewasa, namun juga ke sekolah-sekolah. Karena itu ia yakin kalau kesadaran anti korupsi diluaskan terus menerus secara bersama, maka potensi Indonesia untuk bebas dari korupsi juga akan membesar.





# Kreativitas sebagai Basis Kemandirian<sup>1</sup>

*Hasan Aoni Aziz<sup>2</sup>*

**P**erempuan dan anak merupakan kelompok rentan terdampak Covid-19 baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Salah satunya dapat dilihat dari peningkatan angka kekerasan

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 6: Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
2. Pendiri dan pegiat Omah Dongeng Marwah (Masyarakat Reksa Warisan Berharga), sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang mengusung tradisi dongeng sebagai metode pembelajaran. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)

terhadap perempuan dan anak di masa pandemi. Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Indonesia menyebutkan jika jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat lebih dari 51 persen<sup>3</sup>. Berdasarkan data Sistem Informasi Online PPPA (Simfoni-PPPA), rentang 2 Maret hingga 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Selanjutnya, terdapat 368 kasus kekerasan anak dengan korban sebanyak 470 anak<sup>4</sup>. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara, seperti Inggris, China, Brasil, Bangladesh, dan Amerika Serikat.

Tingginya frekuensi laki-laki atau perempuan berada (bekerja) di luar rumah ditengarai sebagai penyebab ketidakharmonisan hubungan yang kemudian jadi pemicu kasus kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Sehingga semestinya pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum “paksa” untuk mengembalikan pasangan suami-istri lebih kerap berada di rumah, menata keharmonisan keluarga, dan berpeluang menjadi *hari keluarga* terlama sepanjang sejarah. Namun, saat protokol kesehatan memaksa keluarga untuk kembali ke rumah dan berkegiatan di rumah, yang terjadi justru sebaliknya. Peningkatan kasus kekerasan di dalam rumah tangga ini semacam ironi intensitas pertemuan keluarga di masa pandemi Covid-19. Kasus peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dan Amerika, dua tipologi khas keluarga di dunia—keluarga Indonesia dikenal harmonis dan ramah dan

---

3. <https://lbhapik.or.id>

4. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>



keluarga Amerika dikenal memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi—menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 ini. Umumnya, pelaku kekerasan di Indonesia akan mendapat sanksi sosial dan di Amerika mendapatkan ganjaran hukum berat dengan mekanisme rumit untuk bisa kembali berada di tengah-tengah keluarga.

Pertanyaannya, bagaimana kita memahami dengan fenomena ini: pemicu ketidakharmonisan, langkah-langkah pencegahan, hingga harapan baru sebagai model pemberdayaan perempuan dan anak di masa depan?

## **Pandemi, *Anomie*, dan Kebijakan**

Covid-19 memberikan efek ketidakpastian baik secara kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Rasa cemas, jenuh, stres, depresi, dan bingung adalah perilaku psikologis yang sering muncul dalam situasi pandemi belakangan ini. Situasi ini memproduksi nilai, perilaku, dan psikologi baru keluarga di semua level secara bersamaan.

Efek kecemasan tergambar dalam berbagai survei yang dilakukan di Indonesia belum lama ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mencatat 64,3% dari 1.522 responden merasakan cemas bahkan gejala depresi di masa pandemi Covid-19<sup>5</sup>. Hal sama ditemukan dalam survei Persakmi dan IKA FKM Universitas Airlangga melalui daring di 34 provinsi, Juni

---

5. Tirto.id

2020 lalu. 76 persen dari 8.031 responden usia antara 30-39 tahun mengalami kecemasan paling tinggi. Dan perempuan mengalami kecemasan lebih tinggi, yakni 77,7 persen dibanding laki-laki, 64,6 persen<sup>6</sup>.

Kecemasan dapat memicu ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, baik yang sudah terbentuk sebelumnya maupun sebagai konflik baru. Selain intensitas pertengkaran di masa pandemi makin sering terjadi, varian masalah yang muncul juga sangat beragam. Tugas-tugas yang sebelumnya bisa dibagi ke pihak luar, karena keterbatasan interaksi sosial di masa pandemi, terpaksa diselesaikan sendiri oleh anggota keluarga dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi situasi baru ini memicu apa yang disebut Émile Durkheim sebagai *anomie*<sup>7</sup>.

*Anomie* adalah situasi ketidakcocokan antara harapan individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan ketersediaan solusi yang ada. Dengan kata lain, konflik dan psikologis yang muncul dalam situasi ketidakpastian tersebut datang lebih maju dan beragam dibanding solusi yang tersedia. Durkheim memotret situasi kekacauan psikologis itu saat terjadi revolusi industri abad ke-19. Masa itu terjadi kecemasan yang mencekam yang memicu depresi bahkan bunuh diri.

Situasi tersebut menyerupai kondisi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu indikator konflik dalam keluarga bisa dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang

---

6. Persami.or.id

7. Merton, Robert. K. *Social Structure And Anomie*. Harvard University, 1938.



tidak lagi sebagai gejala normal. Dibutuhkan perspektif baru guna menempatkan semua perilaku yang muncul sebagai faktor penting untuk menghadapi situasi kenormalan baru pasca pandemi. Lantas bagaimana daya tawar kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak?

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu yang dikampanyekan sejak lama melalui berbagai program baik oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga sosial dan advokasi, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Isu tersebut kembali mengemuka menyusul laporan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama masa pandemi Covid-19. Gerak berbagai program pemberdayaan dan perlindungan anak serta kualitas relasi antaranggota keluarga seakan sedang diuji.

Berbagai respons terhadap kelemahan dan kekurangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, berdatangan. Beberapa di antaranya saya coba kelompokkan menjadi: (1) tidak menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek pemberdayaan; (2) tidak dilakukan secara Multi perspektif, baik dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan program; (3) masih bersifat sektoral; (4) *task force* kementerian yang ditempatkan di masyarakat masih menunjukkan sikap tidak mandiri dan gamang dalam menghadapi situasi di lapangan; (5) program masih sangat teoretis, administratif dan bias kota, sehingga tidak aplikatif; (6) masih bersifat redundan dan iteratif (berulang); (7) belum melakukan pendekatan kebudayaan dalam strategi pemberdayaan; (8) belum



melibatkan lelaki secara penuh dalam program pemberdayaan sebagai sumber masalah relasi kekuasaan.

Kritik tersebut memaksa kita untuk merevisi, bahkan memikirkan ulang berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak: *pertama*, kegagalan berbagai program mendorong perlunya menyusun kembali konsep pemberdayaan secara total dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek serta mencukupi berbagai pranata sosial dan bila perlu upaya paksa (*law enforcement*), dan *kedua*, kekerasan di masa pandemi Covid-19 berpotensi menguatkan relasi kuasa yang sudah ada dan berpotensi memporandakan skema kesetaraan yang sudah terbentuk.

## **Lelaki dalam Ideologi dan Kebudayaan**

Keluarga merupakan unit manajemen konflik terkecil dalam masyarakat. Di lingkungan keluarga, konflik bisa muncul setiap hari dengan berbagai penyebab. Tidak jarang proses penyelesaian diikuti tindak kekerasan terhadap pihak yang secara fisik lemah, dalam hal ini perempuan dan anak.

Konflik bisa muncul ketika penyelesaian didekati dengan perspektif yang berbeda dan masing-masing anggota bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Selain itu, ketidaksetaraan relasi antaranggota keluarga oleh beban ideologis dan kebudayaan—patriarki—juga menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga.



Ideologi sistem patriarki meyakini jika laki-laki menjadi sumber kebenaran dan teladan, dan sistem kebudayaan menempatkan laki-laki atau suami sebagai pewaris kewenangan lebih tinggi dibanding ibu dan anak.

Ideologi dan kebudayaan memang merupakan warisan sejarah di hampir semua bangsa. Akan tetapi kita bisa bersikap menerima atau menolak itu sebagai kesepakatan budaya dengan pertimbangan utama bahwa relasi yang berkembang memberi peluang kemerdekaan aksesibilitas dan partisipasi antaranggota keluarga. Misalnya dengan pertukaran serta berbagi peran. Sayangnya sudah menjadi rahasia umum jika watak buruk ideologi dan kebudayaan adalah kekuasaan. Manifestasi kekuasaan dalam berbagai praktik sosial sering kali mengubur posisi dan peluang subordinat untuk menggugat superioritas kelaki-lakian. Galtung (1980)<sup>8</sup> mendefinisikan kekerasan sebagai *any avoidable impediment to self-realization*, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.

## **Kegagalan Resiprokal di Lingkungan Keluarga**

Salah satu ciri perubahan pola dan perilaku keluarga saat masa pandemi Covid-19 yakni memindahkan semua urusan pekerjaan dan kegiatan belajar ke rumah. Perempuan sebagai pewaris keterampilan utama pekerjaan domestik dalam perspektif patriarki mengalami beban ganda. Perempuan kemudian tidak tidak semata pendamping

---

8. Galtung, Johan. *Peace and World Structure*. Brill Academic Pub,1980



bagi anak-anak saat belajar mandiri di rumah, melainkan juga membantu urusan suami, yang sebelum masa pandemi dibagi dengan pihak luar. Laki-laki yang ditempatkan sebagai peran utama dalam struktur sosiologi dan budaya industri terbukti telah gagap menghadapi situasi baru saat kebutuhan untuk berbagi peran domestik harus dijalani di masa pandemi Covid-19. Terjadi kegagalan resiprokal (timbang balik) antara perempuan dan laki-laki, terutama di kalangan keluarga kota.

Pandemi Covid-19 mengajarkan kita bahwa pekerjaan yang terbagi atas dasar gender dan tradisi terbukti tidak elastis menghadapi perubahan zaman. Pembagian peran berdasarkan gender dan tradisi terkoreksi dengan sendirinya. Akan tetapi, fenomena keruwetan dan konflik tersebut umum ditemui di wilayah perkotaan atau industri. itu tidak terjadi secara total pada masyarakat desa.

## **Keluarga di Desa dan di Kota**

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017, kekerasan dalam rumah tangga atau **KDRT** terhadap perempuan di perkotaan lebih besar 6,5 persen dibanding kekerasan yang terjadi di perdesaan pada periode yang sama, yakni 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di perdesaan.<sup>9</sup> Jika data tersebut bisa dijadikan gambaran, menarik mengetahui berbagai kelebihan desa dalam kerangka membangun model pemberdayaan perempuan dan anak di masa depan pasca pandemi Covid-19. *Pertama*, sifat sosial

---

9. [www.cantika.com](http://www.cantika.com)



masyarakat desa yang *guyub* dan tidak individualis memungkinkan rendahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa dibanding di kota. Sanksi sosial atas tindak kejahatan kekerasan serta berfungsinya pranata sosial di desa tidak saja menyumbang rendahnya angka kekerasan, juga mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan anak di desa. Dalam strata yang lebih besar, upaya ini dapat menjadikan desa menjadi penjaga etika dan moral bangsa.

*Kedua*, kolaborasi perempuan di desa dalam usaha ekonomi yang digeluti keluarga (suami), merupakan modal sosial pemberdayaan perempuan dan anak di desa. Klaim perempuan kota lebih mandiri dibanding di desa adalah delusi modernitas, karena kemandirian dengan menempatkan kaum profesional pada struktur perusahaan terbukti menunjukkan ketidakmandirian sesungguhnya. Saat perusahaan mengalami kebangkrutan oleh pengaruh pandemi Covid-19, perempuan kota gamang melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri akibat ketergantungan yang sangat besar dalam struktur industri selama ini.

*Ketiga*, desa sebagai sumber produksi pangan, baik pertanian, peternakan, maupun perikanan, adalah struktur alam dan sosial yang sangat mendukung bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak Indonesia. Dengan kolaborasi yang terjadi selama ini dalam kegiatan ekonomi antara perempuan dan laki-laki serta anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan perempuan dan anak memiliki peran pemberdayaan lebih besar jika pengembangan ekonomi berbasis desa dikembangkan



di waktu yang akan datang. Lubang yang masih belum terisi dari potensi ini adalah nilai tukar produksi yang masih rendah, biaya produksi yang mahal, tidak terdukungnya infrastruktur usaha, tidak terintegrasinya usaha masyarakat desa, serta terputusnya pengembangan industri olahan hasil masyarakat desa.

## **Mengembangkan Kreativitas Perempuan dan Anak bersama *Omah Dongeng Marwah***

Pengembangan kreativitas berpengaruh signifikan dalam membangun kemandirian sekaligus mengubah pandangan kaum lelaki terhadap perempuan dan anak. Anak yang selama ini dipandang sebagai objek pengaturan, dianggap belum dewasa, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan mandiri, terbukti melalui upaya pengembangan bakat dan minat menghasilkan berbagai kreasi di berbagai bidang. Simpulan ini diperoleh berdasarkan pengalaman mengelola potensi dan minat anak serta ibu di *Omah Dongeng Marwah* (ODM) di Kudus, Jawa Timur.

Melalui interaksi, diskusi dan penyelesaian masalah yang bersifat internal sesama anak-anak menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan anak meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini turut berdampak memengaruhi cara pandang orang tua dan masyarakat terhadap kehadiran dan keberadaan anak. Perubahan perspektif ini berpotensi mengurangi tindak kekerasan dikarenakan munculnya penghargaan orang tua terhadap anak-anak.



Demikian juga yang terjadi pada perempuan, dalam hal ini ibu dari orang tua siswa, melalui kegiatan pendampingan pola pengasuhan berkala yang juga melibatkan suami. Beberapa kegiatan bahkan bernilai ekonomi, antara lain pertanian organik dan kegiatan produktif lain di bidang peternakan dan perdagangan.

Hal menonjol yang dirasakan selama pandemi Covid-19 yaitu kemandirian siswa mengisi kegiatan belajar di rumah. Hal tersebut dikarenakan selama ini anak-anak terbiasa mandiri dalam menyusun dan mengerjakan program belajar, dan mengekspresikan bakat dan minat. Selain itu, kemandirian anak terbukti mampu mengurangi tingkat stres orang tua dan siswa. Orang tua yang selama ini menempatkan guru dan sekolah sebagai lembaga penerima kewenangan pendidikan anak secara total, dan memandang pendidikan sebagai pengajaran semata, sering kali terbukti gagal mendampingi anak saat belajar di rumah selama menjalani protokol Covid-19. Jenuh dan stres sering kali memicu munculnya konflik dalam keluarga. Akan tetapi ketika anak telah mampu mandiri, termasuk dalam urusan belajar, konflik relatif berkurang. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap perempuan maupun anak bisa ditekan. Oleh karena itu, sangat penting artinya meningkatkan kreativitas perempuan dan anak melalui berbagai kegiatan yang bisa mengasah *soft skill* maupun *hard skills*.



## Penutup

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 meningkat seiring munculnya berbagai persoalan, baik sosial, ekonomi maupun psikologis, yang menimbulkan ketidakpastian bagi keluarga Indonesia. Desa secara sosial dan budaya terbukti mampu mengurangi angka kekerasan dibanding kota. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki desa sudah seharusnya perspektif pembangunan sosial dan sumber daya manusia mulai diubah dengan menjadikan model dan pola-pola masyarakat desa sebagai sentra pengembangan.

Kemandirian masyarakat kota terbukti hanya delusi modernitas. Kota yang selama ini dijadikan sebagai model pengembangan kemandirian perempuan dan anak di desa, sudah saatnya didekonstruksi total. Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk mengatur ulang kerangka imajinasi pembangunan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa dalam kasus pandemi Covid-19 lebih elastis menerima perubahan.

Salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan dengan membangun daya kreativitas perempuan dan anak melalui pengembangan bakat dan minat secara merdeka dengan basis potensi lokal. Pengembangan tersebut bisa dilakukan melalui pendekatan di bidang pendidikan, seni, ekonomi maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam pranata sosial yang ada.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman *Omah Dongeng Marwah* (ODM), Kudus, Jawa Timur, relatif berhasil melindungi perempuan



dan anak dari tindak kekerasan, sekaligus berpeluang menyetarakan relasi perempuan terhadap laki-laki. Saatnya desa menjadi pusat pengembangan peradaban Indonesia di masa yang akan datang pasca pandemi Covid-19.[]



## Profil Penulis

Ia lebih dikenal sebagai pegiat yang mengajak masyarakat agar tidak memusuhi tembakau. Mantan Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) ini, melihat industri tembakau di Indonesia terkait erat dengan nasib petaninya. Karena itu, Hasan Aoni Aziz sangat vokal saat pemerintah menaikkan cukai rokok. Menurutnya, kenaikan tersebut akan berdampak langsung pada ekonomi petani, akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Hasan juga sangat konsen pada tradisi dongeng. Ia merupakan pendiri dan pegiat Omah Dongeng Marwah (Masyarakat Reksa Warisan Berharga). Sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang mengusung tradisi dongeng sebagai metode pembelajaran. Komunitas yang digagas Hasan ini punya misi merawat warisan berharga, termasuk berbagai kebudayaan dan nilai moral yang menyertainya. Di Omah Dongeng Marwah, bakat kesenian anak-anak mendapat wadah. Seni yang diajarkan juga beragam, mulai dari menulis, musik, teater hingga film.





# Membangun Sistem Pengawasan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Seksual yang Menjangkau Perdesaan<sup>1</sup>

*Diah Irawaty<sup>2</sup>*

## Pendahuluan

**K**ekerasan seksual bukan lagi isu yang terlalu asing bagi telinga masyarakat kita. Banyak warga yang mulai familier dan sadar dengan persoalan ini; bahkan di antara mereka mulai terlibat dalam

1. Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 6 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui Call for Paper.
2. Pernah bekerja di beberapa Lembaga/LSM perempuan, seperti SIKAP, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, dan Komnas Perempuan. Mendapat BA (SAg) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan MA dalam Sustainable International Development Studies dengan konsentrasi Women's and Gender Studies dari Brandeis University, Massachusetts, AS. Saat ini, penulis adalah kandidat Ph.D. di Socio-Cultural Anthropology, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, AS.

berbagai upaya dan gerakan penghapusan kekerasan seksual. Meski demikian, kekerasan seksual masih menjadi ancaman sangat serius bagi banyak warga Indonesia, utamanya perempuan dan anak-anak (baik anak perempuan maupun anak laki-laki). Kasus-kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan terjadi di berbagai ruang, baik di ranah privat maupun publik.

Salah satu persoalan yang menghambat gerakan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia adalah berbagai upaya dalam gerakan tersebut yang belum sepenuhnya menjangkau pedesaan. Isu kekerasan seksual seakan-akan masih menjadi isu “orang kota”, menjadi cerita keseraman kota (*urban legend*) yang lebih banyak terkonsentrasi di wilayah urban (*urban centric*). Bukan hanya terkait informasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, masyarakat pedesaan masih sangat sulit mengakses layanan penanganan kasus jika terjadi kekerasan seksual di wilayah mereka. Padahal, harus ditegaskan, tidak seperti kejahatan lain, kekerasan seksual membutuhkan penanganan khusus, apalagi jika terkait dengan kondisi para korban dan *survivor/penyintas*.

Tulisan ini mendiskusikan pentingnya membangun berbagai upaya pengawasan dan penanganan kekerasan seksual secara terpadu dan integratif yang bisa menjangkau level pedesaan. Tulisan ini menekankan pentingnya gerakan antikekerasan seksual yang tidak *urban centric*, tetapi bisa diakses komunitas pedesaan. Bukan saja demi penanganan kasus yang lebih holistik dan terpadu, tetapi juga demi membangun budaya berani melapor kekerasan seksual dengan



tetap mempertimbangkan hak-hak para korban. Sistem sosial-budaya pedesaan yang masih mengandalkan kedekatan hubungan sosial (*social intimacy*) merupakan potensi yang bisa dikembangkan demi menguatkan gerakan pengawasan dan penanganan kekerasan seksual secara terpadu.

## Gambaran Situasi Kekerasan Seksual

*World Health Organization* (2011)<sup>3</sup> menjelaskan, kekerasan seksual adalah,

*“Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim in any setting including but not limited to home and work.”*

Kekerasan seksual merupakan kejahatan pandemi (*pandemic crime*) dengan tingginya jumlah pelaporan kasus, antara lain disebabkan oleh dominasi laki-laki dan patriarki, stigma, ketidakberdayaan ekonomi dan sosial, dan pelaku yang tidak dipersekusi. Sistem hukum dan sosial yang tidak mendukung korban semakin membuat korban terpuruk. Stigmatisasi, reviktimisasi (*victim blaming*), budaya tabu atau malu, membuat persoalan kekerasan seksual menjadi kompleks

---

3. World Health Organization. (2011). Violence against women – Intimate Partner and Sexual Violence against Women, Geneva, World Health Organization.

dan semakin sulit diurai. Di samping itu, *political will* yang lemah dari pemerintah dan DPR dalam masalah kekerasan seksual menjadikan tindak kekerasan seksual semakin sulit diurai.

Penelitian Bourgois (1996)<sup>4</sup> menunjukkan kontribusi materi-alisasi maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*) dalam bentuk *machoism* dan *misogyny*. Oleh karena para laki-laki patriarki tidak mampu mendukung keluarganya secara ekonomi, perempuan dan anak-anak menjadi sasaran kontrol sebagai manifestasi krisis maskulinitas mereka karena kehilangan pekerjaan atau ketidakmampuan secara ekonomi. Krug dkk (2002)<sup>5</sup> menyatakan, saat berinterseksi dengan krisis maskulinitas, kemiskinan sering menjadi salah satu pendorong penting kekerasan seksual. Intinya ada pada persoalan krisis maskulinitas atau identitas maskulin di balik kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang mayoritas dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak bisa dilacak akarnya pada ideologi patriarki yang memberi *privilege* hak-hak seksual pada laki-laki.

Mengambil contoh kasus di Bangladesh, Naved (2013)<sup>6</sup> menyebut tidak ada satu pun hukum yang mengkriminalisasi kekerasan dalam perkawinan. Tradisi yang berkembang turun-

---

4. Bourgois, Philippe. (1996). In Search of Masculinity: Violence, Respect and Sexuality among Puerto Rican Crack Dealers in East Harlem. *British Journal of Criminology*, 36(3), pp. 412-427.

5. Krug, Etienne, Dahlberg, Linda, Mercy, James, Zwi, Anthony, and Lozano, Rafael. (2002). *World Report on Violence and Health*, Berlin: World Health Organization.

6. Naved, Ruchira Tabassum Naved, *Arch Sex Behav* (2013). Sexual Violence Towards Married Women in Bangladesh, 42, pp. 595-602.



temurun gagal untuk mengakui kekerasan seksual terhadap istri. Menurut hal ini merefleksikan nilai budaya maskulinitas yang hegemonik. Di Indonesia, selain perempuan dan anak terdapat kelompok rentan lainnya: kaum *difabel/differently abled*, kelompok gender dan seksualitas non-*mainstream*, nonnormatif, seperti transgender atau waria maupun kelompok yang relasi seksualnya tidak diakui hukum di Indonesia. Kekerasan seksual di masa pacaran juga marak terjadi di Indonesia, di samping kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*), yang juga masih tidak diakui di Indonesia sehingga kasusnya sulit diproses secara hukum. World Health Organization (WHO) mengungkap, kekerasan seksual yang paling sering terjadi dan bahkan sampai mengambil bentuk ekstrem adalah kekerasan seksual dalam hubungan intim dengan *partner*/pacar/suami terutama bila dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dilakukan orang yang tidak dikenal.

Kekerasan seksual yang telah menunjukkan situasi darurat akhir-akhir ini di Indonesia sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menghentikannya. Tanpa peran publik, kekerasan seksual akan terus menjadi ancaman serius. Berdasarkan data dari United Nations (2014)<sup>7</sup>, 7 dari 10 perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual. Sementara menurut Banarjee dan Islam (2019)<sup>8</sup>, banyak kasus kekerasan seksual tidak

---

7. United Nations Statistic Divisions. (2014). *The World's Women 2010: Trends and Statistics*, p. 127. United Nation Publication ST/ESA/STAT/SER.K/19.

8. Banarjee, Subrata and Islam, Mohammed Jahirul (January-December 2019). Bangladesh Police Academy (BPA), 191, pp. 34-50.

dilaporkan karena pandangan tabu dan rasa malu dari keluarga para korban. Dalam masyarakat kita, rasa malu dan tabu terkait dengan penilaian bahwa pengalaman kekerasan seksual merupakan aib, bukan saja bagi korban sendiri tapi bagi semua anggota keluarga. Keberanian masyarakat untuk terlibat dalam penghentian kekerasan seksual akan menjadi langkah strategis gerakan penghapusan kekerasan seksual ini.

Kekerasan seksual memiliki akar kompleks mulai dari cara berpikir (*mindset*) yang berpengaruh pada perilaku, akses informasi tentang seksualitas yang minim, hingga lemahnya sistem dan kelembagaan yang terintegratif dalam penghapusan kekerasan seksual. Partisipasi masyarakat dalam kampanye melawan kekerasan seksual juga masih sangat lemah. Harus diakui, yang bekerja paling aktif dan intensif dalam upaya melawan kekerasan seksual adalah lembaga-lembaga dalam lingkungan gerakan perempuan.

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) diharapkan dapat menjadi kekuatan hukum lebih paripurna dalam penghapusan kekerasan seksual. Sayangnya, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu DPR membuat keputusan untuk mengeluarkan RUU P-KS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. DPR gagal memahami prioritas nasional, meremehkan upaya pemenuhan hak dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. DPR tidak memahami pentingnya UU P-KS sebagai dasar hukum bagi penguatan upaya penghapusan kekerasan seksual di negara kita. DPR juga tidak menghargai upaya dan perjuangan gerakan



perempuan atas RUU ini, yang telah diinisiasi sejak tahun 2012 itu. Pengesahan RUU P-KS akan mendorong para korban berani melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami. UU P-KS menjadi bagian penting mewujudkan Indonesia sebagai negara yang aman bagi warganya dan terbebas dari ancaman tindak kekerasan seksual oleh siapa pun dan di mana pun.

Kita menghadapi situasi anomali yang memprihatinkan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Satu sisi, kita disuguhi kasus kekerasan seksual yang semakin serius, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Laporan Komnas Perempuan 2019 menunjukkan, di Indonesia setiap hari sedikitnya 35 perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam ranah keluarga, kasus-kasus kekerasan seksual melibatkan ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakak terhadap adik, dan lainnya. Di luar rumah, kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan pesantren atau di lembaga gereja, dengan jumlah korban yang sungguh banyak. Tempat-tempat publik seperti kereta, MRT, bus dan alat transportasi lain, supermarket, hingga sekolah dan tempat ibadah juga tidak lepas menjadi area terjadinya banyak kekerasan seksual. Baru-baru ini kita dibuat syok dengan berita 305 anak mengalami kekerasan seksual dari seorang warga negara Prancis.<sup>9</sup>

---

9. Muhammad Isa Bustomi . 2020. “Lakukan Kekerasan Seksual ke 305 Anak, WNA Perancis Iming-imingi Korban Jadi Model”. Kompas.com, 9 Juli 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/09/19040381/lakukan-kekerasan-seksual-ke-305-anak-wna-perancis-iming-imingi-korban>.)

Pandemi Covid-19 juga memberi dampak nyata terhadap kekerasan seksual. Kita perlu melihat secara kritis meningkatnya angka kehamilan semasa pandemi, mengaitkannya dengan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Sangat mungkin, kehamilan tersebut akibat hubungan seksual tanpa persetujuan (*non-consensual sex*) yang juga bisa disebut perkosaan dalam relasi perkawinan (*marital rape*). Sementara, kehamilan itu, salah satunya sebagai akibat *non-consensual sex* bisa jadi merupakan kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*). Begitu pun dengan media-media online yang memungkinkan kekerasan seksual marak terjadi. *Bully* dan *joke-joke* bernada seksual dan seksisme, pornografi hingga penipuan seksual begitu masif terjadi di ruang daring. Umumnya, kita membatasi diri dalam melihat kasus kekerasan pada relasi laki-laki dan perempuan dan menempatkan perempuan sebagai korbannya. Jika kasus kekerasan diperpanjang menyentuh relasi di luar dualisme gender dan seksualitas, kita akan menemukan daftar yang lebih panjang lagi.

Kekerasan seksual merupakan salah satu realisasi dari kuatnya struktur ketidakadilan terutama berdasar patriarki, misoginisme, dan heteronormativisme. Pengabaian hak-hak korban, sikap diam atau acuh bahkan cenderung menyalahkan korban, sikap setuju terhadap kekerasan seksual sebagai hukuman, seperti terjadi di masa konflik dan perang merupakan beberapa tindakan paling praktis dari realisasi struktur ketidakadilan yang patriarki dan heteronormatif tersebut. Dalam struktur ketidakadilan ini, kita berpandangan



bahwa kelompok yang berkuasa secara seksual “boleh” melakukan kekerasan dan paksaan seksual terhadap yang lemah. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual menjadi salah satu fokus utama dan penting dari feminisme gelombang kedua (*second wave feminism*). Sejak awal 1970an, para feminis telah menginisiasi *shelter* dan pelayanan krisis bagi perempuan korban/penyintas, mengadvokasi perubahan sistem hukum dan institusi *criminal justice* dan bahkan juga menjadi pionir teori dan penelitian ilmiah<sup>10</sup>.

Struktur ketidakadilan patriarki ditemukan dengan jelas pada politik gender dan seksualitas yang berlangsung sejak masa Orde Baru. Formalisasi norma seksualitas tradisional dan patriarki salah satunya termanifestasi lewat UU Perkawinan hingga (pembiaran) kekerasan seksual sebagai hukuman. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998 menjadi bagian strategis dan taktis konsolidasi kekuasaan. Situasi tersebut menunjukkan negara ini adalah negara yang dijalankan atas dasar struktur ketidakadilan patriarki dan heteronormatif yang tidak hanya meremehkan kekerasan seksual, tetapi juga mengabaikan hak-hak korban atas keadilan, bahkan menumbalkan warga dengan mengorbankannya sebagai alat konsolidasi seksual. Berbagai usaha melawan kekerasan seksual sesungguhnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan paling fundamental dalam struktur kenegaraan kita. Semua warga negara seharusnya dijamin oleh negara hak-haknya untuk merasa aman dan

---

10. Marecek, Jeanne. (1999). Trauma Talk in Feminist Clinical Practice. In Lamb, Sharon (Ed.). *New Versions of Victims: Feminists Struggle with the Concept*. (pp.158-182). New York: New York University Press.



bebas dari kekerasan termasuk kekerasan seksual sebagai hak dasar manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi.

Kekerasan seksual juga menjadi persoalan serius dengan melihat akibatnya terutama yang dialami para korban. Selain akibat fisik dan psikis, para korban juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Mereka mengalami penghukuman sebagai korban seperti disalahkan, menjadi objek candaan, dipaksa menikah dengan pelaku. Bahkan, dalam proses hukum, tidak sedikit dari mereka mendapat pelecehan kembali oleh aparat hukum. Banyak korban yang tidak lagi punya harapan akan masa depan; tidak sedikit pula di antara mereka yang trauma berkepanjangan, stres dan bahkan akhirnya memilih bunuh diri. Sikap abai dan hampa empati terhadap situasi yang dihadapi para korban kekerasan seksual menjadi bagian dari penghukuman paling berat yang dihadapi mereka.

Sungguh anomali yang mengkhawatirkan, dengan seriusnya situasi kekerasan seksual tersebut, di sisi lain, kita justru disuguhi keputusan DPR untuk menarik atau mencabut RUU P-KS dari Prolegnas Prioritas 2020. Keputusan ini bukan saja pengkhianatan terhadap upaya sangat panjang dan melelahkan berbagai elemen masyarakat, terutama gerakan perempuan, agar Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menghapus kekerasan seksual sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan struktur yang berkeadilan, yang tidak sama sekali tidak kompromi (*zero tolerance*) terhadap kekerasan seksual.



Di level masyarakat, kita perlu menunjukkan berbagai upaya dan sikap yang lebih merefleksikan kehendak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang antikekerasan seksual. Menyatakan sikap kritis dengan tindakan-tindakan aparatur negara yang permisif atau tidak menganggap penting kekerasan seksual menjadi basis bagi tindakan paling minimalis. Kita harus terus mendesak DPR dan mengkonsolidasi suara publik untuk mendesak DPR mengembalikan pembahasan RUU P-KS sekaligus segera mengesahkannya menjadi Undang-Undang.

Menunjukkan sikap empati dan solidaritas terhadap para korban kekerasan seksual juga sangat penting, bukan saja untuk penguatan korban dan upaya pemenuhan hak dan keadilan bagi mereka, tetapi juga demi menunjukkan secara jelas (*clear and distinct*) ketidaksetujuan kita terhadap perilaku kekerasan seksual. Jika kita tak bisa memberi bantuan pada korban dalam upaya mencari keadilan, kita harus menciptakan situasi sosial yang nyaman dan aman yang memungkinkan mereka memperjuangkan hak dan keadilannya sebagai korban dan *survivor*. Sangat penting membangun pemikiran dan cara pandang, setelah di level negara (*state*) cenderung melanggengkan struktur ketidakadilan, hal demikian tidak boleh terjadi di level masyarakat.

Sementara kekerasan seksual meningkat terus dan menunjukkan situasi darurat, kita melihat negara yang tidak bertindak responsif dalam menyikapi persoalan ini dengan serius. Perempuan di banyak masyarakat kita masih dianggap sebagai sumber masalah

moralitas dan terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Pola pikir yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam kasus kekerasan seksual masih kental di masyarakat kita. Untuk menghindari kekerasan seksual yang semakin marak, mengikuti logika berpikir menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah (*victim blaming*) yang berkembang dalam masyarakat menjadi jalan yang sering dipilih aparaturnegara dalam menangani kekerasan seksual.

*Victim blaming* menunjukkan kuatnya sikap memojokkan korban dengan menuduh tingkah laku korban yang atraktif, penampilan yang provokatif dan cara berbusana korban yang memicu terjadinya tindak kekerasan seksual. *Victim blaming* didasarkan pada mitos yang melahirkan pandangan yang mengesahkan upaya untuk mengontrol tubuh dan gerak perempuan dengan alasan menghindari terjadinya kekerasan seksual. Mitos-mitos tersebut menyiratkan pandangan dan pemikiran tentang situasi asing bagi korban sebagai satu-satunya situasi yang tidak aman yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual.

Kita lebih percaya jika pelaku kekerasan seksual adalah orang yang tidak dikenal korban. Ini merupakan pandangan yang tidak akurat. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di ruang privat di mana korban mengenal dengan baik pelakunya, bahkan masih keluarga dan tetangga sendiri. Kekerasan seksual ini pun semakin marak menimpa anak-anak baik perempuan maupun laki-laki di tempat di mana mereka seharusnya merasa aman



dan mendapat pengawasan dan perlindungan dengan baik, seperti sekolah, musala atau masjid, rumah tetangga tempat mereka main dan dititipkan orang tua mereka.

Dalam pengaruh pandangan *victim blaming*, semakin maraknya kekerasan seksual mendorong orang tua menjadi pihak pemilik otoritas untuk lebih memperketat ruang gerak anak-anak terutama anak perempuan. Naturalisasi relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual membuat masyarakat dan negara mengambil sikap diam, tidak responsif, bahkan di banyak kasus, permisif terhadap kekerasan seksual. Masyarakat dan negara sering kali memahami, kekerasan seksual merupakan akibat alamiah dari relasi sosial dan seksual yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan perempuan pada posisi berseberangan. Masyarakat dan negara memilih cara mengontrol perempuan daripada membuat langkah panjang untuk mengubah relasi kekuasaan agar lebih setara, yang menyentuh kesadaran mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dan memiliki potensi lebih besar sebagai pelaku, sebagai sumber utama persoalan kekerasan seksual.

Salah satu *lexicon* yang diinisiasi para feminis dan mereka yang terlibat dalam isu kesehatan mental adalah *trauma talk* berupa praktek-praktek linguistik bagi persoalan kekerasan yang dialami korban, bukan untuk mempertanyakan apa yang dialami dan bukan untuk menegaskan penderitaan korban. *Trauma talk* merupakan sistem terminologi, metafora, mode representasi untuk membicarakan kekerasan seksual dan fisik yang dialami perempuan korban lainnya. *Trauma talk* menempatkan korban secara



manusiawi dan memberi ruang bagi mereka untuk bersuara dan mengungkapkan pengalaman tanpa rasa takut dan tanpa intimidasi; korban tidak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kejadian keji yang dialaminya.<sup>11</sup>

## **Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Komunitas**

Karena kekerasan seksual mempunyai dampak secara fisik dan psikologis dan bahkan sosial, dibutuhkan penanganan yang komprehensif yang berorientasi pemenuhan hak-hak korban. Kegiatan pendampingan dan konseling bagi para korban dan *survivor* demi mengatasi trauma berkepanjangan dan mencegah destruksi lebih serius dari korban menuntut upaya lebih komprehensif dan terpadu.

Satu upaya penting dan sangat memungkinkan untuk diwujudkan dalam upaya melawan kekerasan seksual adalah membangun sistem pengawasan terpadu dan menyeluruh di berbagai unit sosial yang kita miliki. Inilah upaya berbasis komunitas yang, meski dimulai dengan tujuan praktis, diharapkan akan menjadi upaya yang berkelanjutan dalam perang melawan kekerasan seksual. Kita membutuhkan situasi di mana para predator seksual merasa terus diawasi mata publik yang membuat mereka berpikir dua-tiga kali sebelum melakukan tindakannya. Di sisi lain, sistem pengawasan ini berfungsi sebagai lembaga layanan terdekat bagi mereka yang

---

11. McDonald, Elisabeth. (2014). From ‘Real Rape’ to Real Justice?: Reflections of the Efficacy of More Than 35 Years of Feminism, Activism, and Law Reform. *Law Review*, 45(3), pp. 487-508.



paling berisiko menjadi korban serangan seksual untuk melaporkan kasus atau melaporkan berbagai tindakan yang potensial menjadi serangan seksual. Kelompok berisiko kekerasan seksual perlu mendapatkan akses semudah mungkin untuk melaporkan berbagai tindakan yang mengancam secara seksual

Selain terkait persoalan ideologi patriarki yang di antaranya berpengaruh pada konstruksi maskulinitas berbasis kekerasan dan dominasi (*violent masculinity*). Banyak kasus serangan dan kekerasan seksual terjadi karena para pelaku merasa bebas dan aman saat melakukan tindakannya. Jika persoalan ideologis memerlukan jalan panjang demi perubahan cara berpikir dan cara pandang, persoalan terkait para pelaku yang merasa aman dalam melakukan tindakannya sangat mungkin dicari solusinya dengan cara-cara yang lebih praktis dan cepat, dan lebih dibutuhkan dalam kondisi darurat kekerasan seksual seperti terjadi sekarang ini.

Dalam membangun sistem berbasis komunitas ini, kita bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat. Kekerasan seksual merupakan persoalan serius di Amerika, termasuk kekerasan dalam masa pacaran. Tapi, perang melawan kekerasan seksual juga sangat serius dilakukan berbagai pihak di sana. Di sekolah-sekolah dari semua tingkatan, sangat mudah ditemui brosur tentang kekerasan seksual berisi informasi layanan pengaduan jika mengalami atau menemui kasus. Sekolah bukan saja menyediakan informasi, tapi menjadi salah satu lembaga yang memiliki wadah mapan baik untuk layanan informasi, pengaduan, hingga konseling terkait

kasus kekerasan seksual. Demikian juga di tempat-tempat umum seperti taman dan *playground*, tempat pelayanan transportasi umum, perpustakaan umum, *rest area* termasuk WC umum, kita akan mudah menemukan pengumuman tentang pengaduan tindakan serangan seksual. Layanan pengaduan *emergency* lewat panggilan 911 di mana polisi akan datang ke lokasi” dalam hitungan menit menjadi upaya penting yang disediakan negara untuk membuat pelaku merasa diawasi dan korban dan masyarakat memiliki ‘kesiapsediaan’ untuk melaporkan kasus serangan seksual.

Kita telah memiliki berbagai unit lembaga sosial yang cukup mapan, yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kita memiliki lembaga sosial berupa RT, RW, berbagai tempat ibadah, sekolah, tempat publik seperti terminal angkutan umum, stasiun kereta api, bandar udara dan sejenisnya. Tempat-tempat di mana banyak di antara kita sering melakukan aktivitas rutin seperti mal, pasar dan kendaraan umum. Untuk lingkungan sekolah, jika terlalu sulit menyediakan pendidikan seks dan seksualitas secara formal, sekolah-sekolah di Indonesia bisa memulai dengan upaya-upaya seperti ini. Layanan panggilan darurat seperti 911 sangat mungkin dilakukan dan dipenuhi oleh negara.

Membangun sistem seperti ini tidaklah susah bila diniatkan dengan serius dengan kemauan politik yang kuat dan punya orientasi penyelesaian masalah. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga tidak seperti proyek-proyek pemerintah yang lain yang memakan biaya fantastis. Terpenting, inisiatif ini menjadi bagian



dari upaya membangun partisipasi publik yang lebih luas dan berkesinambungan dalam perang melawan kekerasan seksual. Hal-hal seperti ini terkesan sepele tetapi memiliki dampak yang luar biasa.

Belajar dari pengalaman bersama Kalyanamitra Jakarta, saya menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berbasis komunitas seperti pertemuan reguler RT dan RW, arisan warga, pengajian rutin atau perkumpulan ibu-ibu, remaja masjid dan kegiatan lainnya. Tema yang kita diskusikan beragam untuk memperkenalkan persoalan ketidakadilan gender dan kekerasan seksual mulai kekerasan dalam masa pacaran, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga sampai kekerasan terhadap perempuan secara umum. Kita memiliki struktur dan lembaga sosial yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sistem pengawasan dan pelayanan terpadu terhadap kekerasan gender dan kekerasan seksual. Kita bisa membangun kerja sama dengan perangkat-perangkat desa untuk merealisasikan program pendampingan terpadu berbasis komunitas.

Upaya PUAN Amal Hayati membangun pusat krisis bagi perempuan dan anak korban kekerasan (*women's crisis center*) di berbagai pesantren juga menjadi *best practice* gagasan pengawasan dan penanganan kekerasan yang bisa menjangkau masyarakat di level pedesaan, di mana pesantren banyak berdiri dan menjadi pusat kehidupan sosial. Sistem pelayanan terpadu diharapkan bisa membuat masyarakat pedesaan memiliki akses baik informasi maupun layanan kasus terkait kekerasan seksual dan gender.

Kesenjangan informasi antara kota dan desa terkait isu-isu kekerasan seksual membuat banyak warga pedesaan bahkan tidak memahami apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya dan bagaimana melaporkannya apalagi pelakunya adalah orang yang dikenal, keluarga sendiri atau kerabat, teman atau tetangga. Untuk membangun sistem pelayanan terpadu berbasis komunitas tidaklah terlalu sulit dan tidak membutuhkan biaya mahal dan pembangunan infrastruktur yang mentereng. Berbagai organisasi penyedia layanan pendampingan kasus perlu membangun upaya agar bisa masuk ke pedesaan, membangun kerja sama program pendidikan warga desa tentang isu-isu kekerasan gender dan seksual.

## **Simpulan**

Kekerasan seksual tampak lebih menjadi isu perkotaan yang tidak mudah diakses masyarakat pedesaan, baik dari segi informasi maupun layanan pendampingan kasus. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat pedesaan terus berkembang tanpa upaya serius untuk menghentikannya dan upaya serius dalam penanganan kasus, terutama yang menekankan pemenuhan keadilan dan hak para korban.

Upaya-upaya yang lebih terpadu dalam pengawasan dan penanganan kekerasan seksual yang bisa menjangkau masyarakat pedesaan menjadi agenda mendesak. Upaya tersebut bisa memanfaatkan struktur dan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada, termasuk memberdayakan kegiatan-kegiatan warga desa yang cukup



banyak berkembang. Upaya penanganan kekerasan seksual dan gender yang menjangkau pedesaan akan menjadi upaya transformatif dalam banyak hal, termasuk terkait perubahan pola pikir dan perilaku agar tidak lagi permisif atau diam saat berhadapan dengan kekerasan seksual. Sistem pengawasan dan penanganan kekerasan terpadu yang bisa menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan akan menjadi terobosan sangat penting dalam gerakan antikekerasan seksual di Indonesia; upaya ini akan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan *awareness* warga terhadap persoalan kekerasan dan mendorong kemampuan untuk bersuara dan melaporkan berbagai kasus, dengan, sekali lagi, tetap mempertimbangkan hak para korban. []

## Profil Penulis

Diah Irawaty pernah bekerja di beberapa Lembaga perempuan, seperti SIKAP, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, dan Komnas Perempuan. Alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menyelesaikan program pasca sarjana di bidang *Sustainable International Development Studies* dengan konsentrasi *Women's and Gender Studies* di Brandeis University, Massachusetts, AS. Kandidat Ph.D. di Socio-Cultural Anthropology, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, AS.





# Efektivitas Program Psikoedukasi Prevensi Intensi Pernikahan Dini

di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten  
Bangkalan<sup>1</sup>

*Muniri, S.HI, M.HI<sup>2</sup>*

## Latar Belakang

**U**nited Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) pernah merilis laporan di tahun 2010, tentang

1. Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 6 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui Call for Paper.
2. Dilahirkan di Bangkalan, 17 Februari 1980. Akademisi STAI Al-Hamidiyah Bangkalan dan aktif di Forum Komunikasi Dosen Peneliti (FKDP). Ketua LSM Konsensus Bhiruh Dheun .

jumlah pernikahan dini. Laporan tersebut menunjukkan jika Indonesia berada di urutan ke 37 dari beberapa negara yang jumlah pernikahan dininya terbanyak di dunia. Sedangkan di level ASEAN, menempati urutan kedua setelah Negara Kamboja. Data tersebut diperkuat hasil Sensus Penduduk tahun 2010, yang melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 18% remaja berdasar pada kelompok umur 10-14 tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup. Kejadian menikah dini pada kelompok remaja umur 15-19 tahun yang umumnya tinggal di pedesaan mencapai persentase 3,53% dibandingkan remaja perkotaan<sup>3</sup>. Sementara itu, di Jawa Timur angka intensitas pernikahan dini mencapai 39,4%. Sedangkan di pulau Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, data tahun 2011 angka pernikahan dini di kabupaten Sumenep sebesar 41,72%, kemudian Kabupaten Bangkalan 23,25%, selanjutnya Kabupaten Pamekasan 19,39%, dan peringkat 4 Kabupaten Sampang 17,47%<sup>4</sup>.

Khusus Kabupaten Bangkalan, data terbaru tahun 2019 menunjukkan persentase pernikahan dini menunjukkan penurunan kurang lebih 4,33% setelah 8 tahun dengan jumlah persentase 19,8%. Data ini, disampaikan langsung oleh Amina Rachmawati (Kepada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KB dan P3A) Kabupaten Bangkalan di Balai Pertanian Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, pada 11

3. Zuraidah, Z. (2016). Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015. *Jurnal Penelitian Kesehatan "Suara Forikes"*, 7 (1).

4. Data Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011



Januari 2020 dalam acara Pembukaan Training of Trainer (TOT) dan Seminar Program Psikoedukasi Prevensi Intensi Pernikahan Dini di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan yang diadakan oleh LSM Konsensus Bhiruh Dheun Bangkalan. Bahkan ada kecamatan yang persentase pernikahan dininya mencapai 50,52%, yaitu kecamatan Modung, selanjutnya kecamatan Galis 37,96%, kecamatan Tanjung Bumi 35,16% dan kecamatan Burneh 19,45%<sup>5</sup>. Untuk Desa Langkap salah satu desa di kecamatan Burneh dan menjadi lokasi program psikoedukasi, berdasarkan data 3 tahun terakhir 2017-2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) terjadi 45 pasangan yang menikah dini, belum termasuk dugaan adanya *mark up* umur (rekayasa mengganti umur di KTP sebelum mengurus pernikahan), dan dinikahkan secara siri (belum didaftarkan di KUA setempat) oleh Tokoh Agama setempat dan atas kesepakatan orang tua pasangan. Berdasarkan data ini, menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan masih berada di zona merah untuk kategori daerah yang bebas pernikahan dini.

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa pernikahan yang tergolong dini memiliki risiko yang mengkhawatirkan. Kesiapan mental dalam menjalani kehamilan dan menjalani peran sebagai seorang Ibu, ditambah lagi kesiapan menghadapi masalah-masalah berumah tangga agar pasangan menikah bisa menghadapinya dengan sikap dewasa menjadi syarat penting dalam kelangsungan rumah tangga dan saat mengasuh anak-anaknya. Umumnya, remaja yang menikah belum cukup memiliki kesiapan baik dari segi pengetahuan

---

5. Bangkalan dalam Angka, terbitan tahun 2019

maupun segi mental tentang keharusan peran seorang istri dan seorang ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan, demikian juga pada seorang laki-laki sebagai Bapak dan kepala rumah tangga. Kondisi ini, tentu menjadi titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Dengan memandang dan mengkaji fakta pernikahan dalam usia dini lebih cenderung mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Namun, fakta persidangan dari kasus perceraian bukan karena alasan menikah dini, melainkan alasan ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Padahal masalah-masalah yang menjadi fakta persidangan dalam kasus perceraian dari pasangan yang menikah dini tentu saja ada hubungan kuat dengan pernikahan tanpa kematangan usia dan psikologis<sup>6</sup>.

Mempertimbangkan data-data tentang dampak negatif dari pernikahan dini, LSM Konsensus Bhiruh Dheun Bangkalan-Madura melakukan sebuah program psikoedukasi di desa Langkap selama 7 bulan, prosesnya dimulai bulan Desember 2019 hingga berakhir awal Juni 2020. Psikoedukasi diberikan kepada siswi-siswi rentan menikah dini di 5 sekolah, dengan tujuan sebagai upaya preventif intensi pernikahan dini. Psikoedukasi merupakan pendekatan intervensi yang dapat dilakukan pada sekelompok individu dengan karakteristik yang sama, dengan tujuan untuk

---

6. Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan Konseling (Studi dan karier)*, Penerbit Andi. Yogyakarta.



memberikan informasi dan pemahaman terkait sikap yang terbentuk dalam dirinya<sup>7</sup>.

Berbekal pemahaman yang didapatkan melalui program psikoedukasi, siswi-siswi rentan menikah dini di 5 sekolah diharapkan memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan serta menetapkan sikap dan tindakan dalam hidupnya terutama berkaitan dengan keputusan untuk menikah pada usia dini. Pada proses intervensi ini, dibutuhkan suatu prosedur operasional yang termuat dalam modul psikoedukasi sehingga intervensi yang dilakukan dapat berlangsung secara terstandar bagi siswi-siswi rentan menikah dini.

Pelaksanaan program psikoedukasi berjalan efektif, mengacu pada hasil analisis statistik dengan membandingkan tingkat intensi menikah dini pada remaja sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Berdasarkan uji analisis statistik, dapat diketahui bahwa intensi pernikahan dini tampak menurun signifikan setelah dilakukannya intervensi psikoedukasi. Tampak pada nilai rata-rata yang lebih rendah pada remaja setelah mendapatkan intervensi melalui modul psikoedukasi. Selain itu, terdapat perubahan sikap yang signifikan pada remaja, antara sebelum dan sesudah mendapatkan intervensi psikoedukasi terhadap intensi pernikahan dini. Oleh karena itu, menimbang efektivitas program psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini yang dilakukan oleh LSM Konsensus Bhiruh Dheun layak untuk diterapkan di daerah Indonesia yang tingkat intensi pernikahan dininya sangat tinggi, karena alasan inilah penulis

---

7. Supratiknya. A (2008). Merancang Program dan Modul Psikoedukasi, Penerbit. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

merasa perlu menuliskan pengalaman ini dalam bentuk paper, dengan tujuan untuk menjelaskan tentang program psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini dilakukan, dan menyampaikan efektivitas program psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini yang dilakukan di desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan-Madura.

Program psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini yang dilakukan oleh LSM Konsensus Bhiruh Dheun kepada partisipan tidak hanya mengenai perkembangan psikologis pada masa remaja dan kesehatan reproduksi pada masa remaja, tetapi juga dilengkapi konsep diri remaja. Materi bertujuan agar partisipan memahami tentang konsep diri dan menerapkannya bagi diri sendiri. Selain itu, juga disampaikan materi keterampilan sosial remaja dengan tujuan agar partisipan memahami dan menerapkan keterampilan sosial dalam hubungannya dengan orang lain pada kehidupan sehari-hari, serta materi tentang kemampuan menyelesaikan masalah pada remaja yang tujuannya agar partisipan memahami konsep penyelesaian masalah yang dapat diterapkan untuk mengatasi problem kehidupannya serta menggunakan strategi yang efektif sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

Psikoedukasi tidak hanya bisa diimplementasikan pada individu saja, tetapi juga pada keluarga atau kelompok. Penjelasan tentang psikoedukasi di atas, memberikan gambaran bahwa psikoedukasi merupakan tindakan mengembalikan dan pemulihan partisipan.

---

8. Tim Konsensus Bhiruh Dheun (2020). Modul Pelatihan Psikoedukasi Prevensi Intensi Pernikahan Dini, Penerbit Media Guru. Surabaya.



Dalam konteks psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini dilakukan untuk mengajarkan siswi-siswi yang rentan menikah dini mengenai masalah pernikahan dini agar mereka tidak bersikap afirmatif. Dengan menghilangkan sikap afirmatif pada mereka terhadap pernikahan dini bertujuan mencegah terjadinya pernikahan dini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Di samping fasilitator memegang peranan penting saat psikoedukasi berlangsung, kekuatan partisipan yang lebih fokus pada saat ini dan masa depan sangat penting agar alur psikoedukasi tidak terjebak dengan kesulitan-kesulitan di masa lalu. Maka dari itu, seharusnya psikoedukasi yang disampaikan harus memuat informasi-informasi penting yang berhubungan dengan permasalahan partisipan, dan juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang sangat berguna bagi partisipan dalam menghadapi permasalahannya. Psikoedukasi lebih menekankan pada proses belajar dan pendidikan dan dapat diterapkan dalam berbagai kelompok usia dan tingkat pendidikan, tapi ada perbedaan dalam skala prioritas lebih menekankan pada proporsi komponen kognitif atau proporsi komponen afektifnya, yang tentunya berdasarkan kebutuhan.



## **Efektivitas Pelatihan Psikoedukasi dalam Menurunkan Intensi Pernikahan Dini di Desa Langkap, Kecamatan Burneh**

Untuk mengetahui efektivitas pelatihan psikoedukasi pencegahan intensi pernikahan dini, maka diuji hasil *pre-test* dan *post-test* tentang kecenderungan pernikahan dini pada partisipan (peserta pelatihan). Para partisipan yang berjumlah 93 orang, ditetapkan melalui teknik *purposive* di mana hanya peserta yang lolos *screening*/seleksi yang memiliki kecenderungan intensi pernikahan dininya tinggi. Melalui rangkaian proses kegiatan pelatihan dengan 5 modul pelatihan, dan secara nyata terjadi peningkatan pengetahuan tentang perkembangan psikologi dan kesehatan reproduksi remaja, dan juga terjadi peningkatan *soft skill* yang meliputi konsep diri remaja yang semakin positif meningkat, keterampilan sosial dan kemampuan *problem solving*. Maka selanjutnya diuji secara umum terkait dengan kecenderungan intensi pernikahan dini.

Tabel 1. menginformasikan tentang hasil *paired samples statistics* bahwa ada perubahan kecenderungan intensi pernikahan dini pada para peserta pelatihan, di mana rata-rata kecenderungan intensi pernikahan dini peserta setelah diberikan pelatihan psikoedukasi pencegahan intensi pernikahan dini itu menurun (*mean post-test*= 35.0430 < *mean pretest* = 40.4301). Artinya, ada penurunan kecenderungan intensi pernikahan dini pada peserta setelah diberikan pelatihan psikoedukasi pencegahan intensi pernikahan dini.



Tabel 1. Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pretest Intervensi Prevensi Pernikahan Dini	40.4301	93	10.24207	1.06205
	Posttest Intervensi Prevensi Pernikahan Dini	35.0430	93	8.82796	.91542

Tabel 2. menginformasikan tentang hasil *paired samples t-test* bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan kecenderungan intensi pernikahan dini para partisipan antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini ( $t=-9.228$ ,  $df=92$ ,  $P=.000 < .05$ ).

Tabel 2. Paired Samples Test									
		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. De- viation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pretest Intervensi Prevensi Pernika- han Dini - Posttest Intervensi Prevensi Pernikahan Dini	5.38710	5.62995	.58380	4.22762	6.54657	9.228	92	.000

Tabel 3. menginformasikan tentang hasil *paired samples correlations* bahwa secara statistik ada hubungan yang signifikan kecenderungan intensi pernikahan dini antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini ( $r=.836$ ;  $P=.000 < .05$ ).



		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pretest Intervensi Prevensi Pernikahan Dini & Posttest Intervensi Prevensi Pernikahan Dini	93	.836	.000

Berdasarkan analisis *paired samples-test* tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perubahan yaitu penurunan kecenderungan intensi pernikahan dini para partisipan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini. Secara statistik, ada perbedaan yang sangat signifikan kecenderungan pernikahan dini antara sebelum dan sesudah pelatihan, di mana setelah pelatihan rata-rata kecenderungan pernikahan dini para peserta lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Artinya, pelatihan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini ini sangat efektif untuk menurunkan kecenderungan pernikahan dini.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indonesia di level ASEAN, intensitas pernikahan dini terbanyak setelah negara Kamboja, dan propinsi Jawa Timur menyumbang angka persentase 39,4%. Angka tersebut mencakup keseluruhan kejadian pernikahan dini di Madura, untuk kabupaten Sumenep sebesar 41,72%, kemudian Kabupaten Bangkalan 23,25%, selanjutnya Kabupaten Pamekasan 19,39%, dan peringkat 4 Kabupaten Sampang 17,47%, data tahun 2011.



Data terbaru tahun 2019, khusus Kabupaten Bangkalan intensitas pernikahan dini mengalami penurunan dari persentase 23,25 menjadi 19,8%. Dari beberapa kecamatan yang menyumbang angka persentase pernikahan dini tertinggi, adalah kecamatan Modung mencapai 50,52%, selanjutnya kecamatan Galis 37,96%, kecamatan Tanjung Bumi 35,16% dan kecamatan Burneh 19,45%.

Desa Langkap merupakan salah satu desa di kecamatan Burneh yang menjadi lokasi program psikoedukasi, dalam 3 tahun terakhir 2017-2019 terjadi 45 pasangan yang menikah dini, belum termasuk dugaan adanya *mark up* umur (rekayasa mengganti umur di KTP sebelum mengurus pernikahan), dan dinikahkan secara siri oleh Tokoh Agama setempat atas kesepakatan orang tua pasangan.

Pelaksanaan program psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini yang dilaksanakan oleh LSM Konsensus Bhiruh Dheun kepada siswi-siswi rentan menikah dini di SMPN 1 Burneh, SMP Darul Hikmah, MTs Darul Hikmah, SMP Sunan Ampel, dan SMP Kanzul Ulum yang terletak di desa Langkap memberikan efek yang maksimal menurunkan intensi pernikahan dini. Dengan bukti adanya perbedaan penurunan secara nyata intensi pernikahan dini setelah diberikan pelatihan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini melalui 5 modul pelatihan.[]

## **Profil Penulis**

Muniri dilahirkan di Bangkalan, 17 Februari 1980. Alumnus Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Arrahmaniyah (RUA), IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah. Menyelesaikan studi pasca sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi Hukum Islam. Akademisi STAI Al-Hamidiyah Bangkalan dan aktif di Forum Komunikasi Dosen Peneliti (FKDP). Menjabat sebagai ketua LSM Konsensus Bhiruh Dheun, Bangkalan.





# Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

**Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:  
Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa**

*Oleh:*

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,  
Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

## **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggunharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggunharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggunharjo melalui Ponggung Tanggag Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggunharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggag melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggunharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Lapor dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, pasardesa.id menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya.



Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai



kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan



rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi



kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>1</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/

- 
1. Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.
  2. Wibowo, A. Setyo. 2020. *Ibid.* Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.



jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>3</sup>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan

3. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya.



Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkah manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan.

Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.



Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berkelakuan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



## Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang

berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.



Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujud. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah



sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.



Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>4</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan

---

4. Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.



## Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20

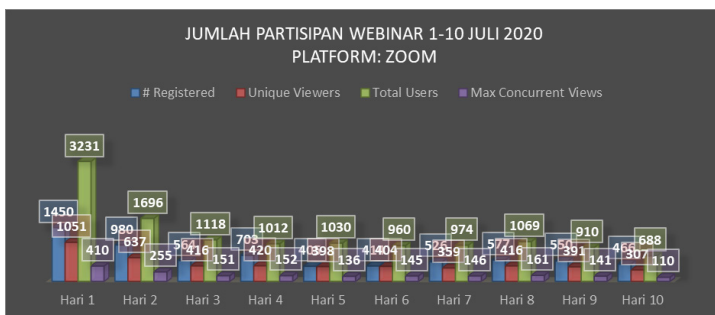


tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru;



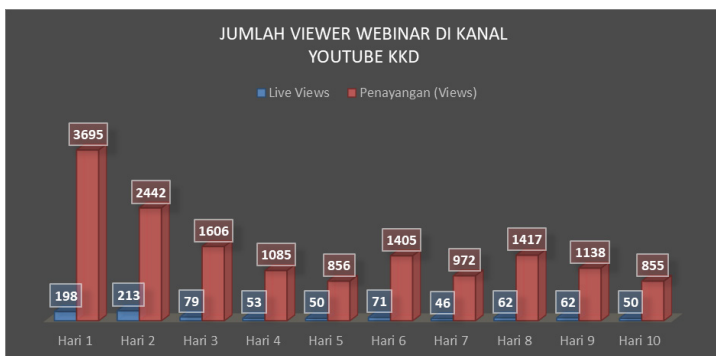
Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:



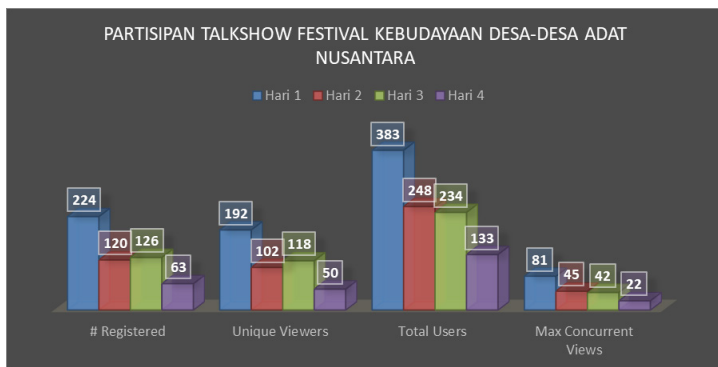
Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara. com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang



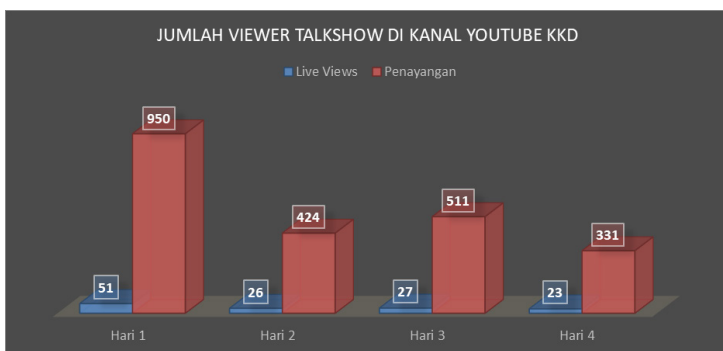
arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.



Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung

melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

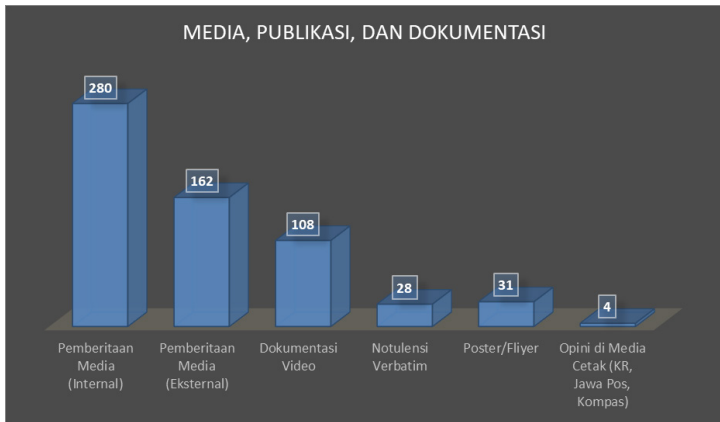


Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesa.id](http://www.kongreskebudayaandesa.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah



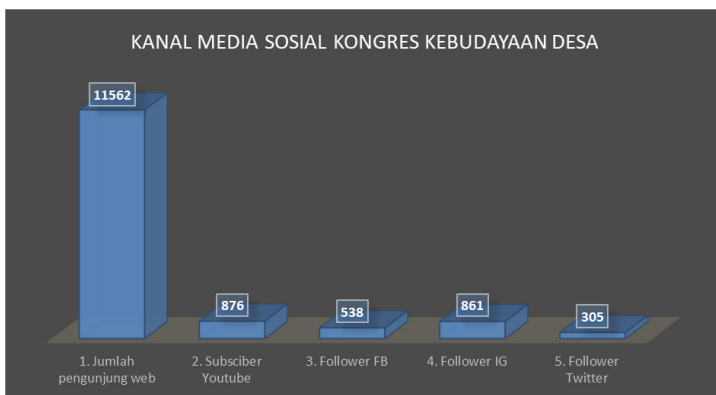
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesa.id](http://www.kongreskebudayaandesa.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan





Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian



desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun.*

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat



secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesubi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan![]

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





# Deklarasi

## ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

**M**engingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa



sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Yogyakarta 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

### PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

#### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

##### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

##### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

##### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

##### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

##### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi



# JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KESADAYAAAN

